

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026
Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulanan 2026	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan</i>					
1.1	Indikator 1.1 Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan	Triliun	16,56	6,64	2,24	33,73%
1.2	Indikator 1.2 Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	Persentase	80%	20%	40,98%	102,46%
II	<i>Sasaran Kegiatan 2 Terjaganya Inflasi di Kisaran Sasaran</i>					
2.1	Indikator 2.1Tingkat Inflasi	Persentase	2,5% ±1%	2,5% ±1%	3,34	100%
III	<i>Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya Implementasi Kebijakan Stimulus Ekonomi yang Optimal</i>					
3.1	Indikator 3.1 Persentase Kebijakan stimulus ekonomi yang terlaksana	Persentase	80%	80%	80%	100%
IV	<i>Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan yang berkualitas</i>					
4.1	Indikator 4.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian	Persentase	80%	40%	40%	100%

	kebijakan Bahan Baku Obat (BBO) oleh BUMN					
4.2	Indikator 4.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan industri baja oleh BUMN	Persentase	80%	40%	40%	100%
4.3	Indikator 4.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Sumber Bahan Baku Berbasis Tebu	Persentase	80%	40%	40%	100%
4.4	Indikator 4.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stabilitas Harga	Persentase	80%	40%	40%	100%
4.5	Indikator 4.5 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Sektor Eksternal	Persentase	80%	40%	40%	100%
4.6	Indikator 4.6 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Program Stimulus Ekonomi	Persentase	80%	40%	40%	100%
V	Sasaran Kegiatan 5. Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan yang Berkualitas					
5.1	Indikator 4.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	Indeks	3 dari 4	4	4	100%
VI	Sasaran Kegiatan 6. Terwujudnya tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan yang Berkualitas					
6.1	Indikator 6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	Persentase	85%	40%	40%	100%

Kinerja Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan
---	--

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan
2. Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan

Latar Belakang

Belanja modal (*capital expenditure/capex*) merupakan indikator penting untuk menilai komitmen investasi BUMN dalam memperluas kapasitas usaha dan mendukung agenda industrialisasi nasional. Tingkat realisasi *capex* mencerminkan efektivitas eksekusi program kerja dan keseriusan BUMN dalam berkontribusi terhadap prioritas pembangunan. Oleh karena itu, pengukuran atas persentase realisasi belanja modal menjadi relevan sebagai indikator kinerja utama bagi koordinasi Kemenko Perekonomian dalam mendorong akselerasi pertumbuhan sektor industri prioritas.

Upaya Pengembangan Usaha BUMN membutuhkan belanja modal (*capex*) yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mendorong hal tersebut, dilakukan koordinasi dan monitoring pada BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan sehingga target persentase realisasi belanja modal tahun 2026 sebesar 60% berdasarkan *cascading* dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dapat tercapai.

BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan yang dikoordinasikan belanja modalnya yaitu pada BUMN yang memiliki kriteria di antaranya: merupakan BUMN dengan nilai aset besar dan kontribusi tinggi terhadap pendapatan negara, BUMN yang sudah tercatat di pasar modal (*go public*), BUMN sektor strategis yang belum/tidak tercatat di pasar modal, dan BUMN yang menerima PMN di tahun 2024 (sesuai UU nomor 19 tahun 2003). Rincian BUMN yang dikoordinasikan antara lain:

- a. PT Perkebunan Nusantara III / PTPN III (holding perkebunan) dengan target tahun 2026 **Rp 13,25 T**
- b. PT Biofarma (holding farmasi) dengan target tahun 2026 **Rp1,13 T**
- c. PT Biro Klasifikasi Indonesia / BKI (holding SURVEY ID) dengan target tahun 2026 **Rp0,73 T**
- d. PT LEN Industri (holding DEFEND ID) dengan target tahun 2026 **Rp1,45T**

Untuk mencapai target realisasi *capex*, BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan dilakukan melalui: kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi, dan penyusunan laporan dan/atau rekomendasi kebijakan pencapaian belanja modal BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan.

Capaian realisasi belanja modal BUMN merupakan hasil dari akumulasi total nilai *capex* empat (empat) holding BUMN yang dikoordinasikan

$$\text{Realisasi IKU 1.1} = X_1 + X_2 + X_3 + X_4$$

Dengan keterangan:

- X_1 = Belanja Modal holding sektor perkebunan
- X_2 = Belanja Modal holding farmasi
- X_3 = Belanja Modal holding jasa survei
- X_4 = Belanja Modal holding industri pertahanan

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar Rp16,56 Triliun, penetapan persentase realisasi belanja modal tahun 2026 sebesar 60% didasarkan pada cascading dalam Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN. Adapun target triwulanan ditetapkan berdasarkan persentase proyeksi realisasi dari Kementerian BUMN sebagai berikut.

Periode	Proyeksi KBUMN (%)	Target Deputy (Rp Triliun)	Target Asdep (Rp Triliun)
Triwulan II	18,60%	41,78	3,08
Triwulan III	40,10%	90,08	6,64
Triwulan IIII	61,00%	137,03	10,1
Triwulan IIV	100,00%	224,64	16,56

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Belanja Modal (Capex) BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar Rp0,53 Triliun atau mencapai 3,19% dari target Tahun 2026 sebesar Rp16,56 Triliun dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan	Triliun	16,56	2,23	33,73% (Memuaskan)

Narasi tabel pengukuran kinerja dan data dukung capaian kinerja.

Realisasi Belanja Modal BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan merupakan cascading direct dari realisasi belanja modal BUMN di level kedeputan yang ditargetkan sebesar Rp90,08 Triliun pada Triwulan II. Realisasi diperoleh dari proyeksi capaian pada Triwulan II dijumlahkan dengan capaian pada Triwulan I. Rendahnya realisasi capex dikarenakan data yang digunakan merupakan data proyeksi.

Kualitas/dampak dari capaian kinerja

Realisasi capex yang masih rendah menunjukkan bahwa BUMN menerapkan pendekatan yang lebih berhati-hati dalam mengalokasikan belanja modal. Kondisi ini dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global, berlanjutnya penundaan ekspansi, serta perlambatan pertumbuhan domestik. Dalam situasi tersebut, BUMN cenderung lebih selektif dalam menjalankan proyek investasi berskala besar dan lebih memprioritaskan efisiensi operasional. Hal ini berpotensi menunda optimalisasi kontribusi BUMN terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan melalui penguatan koordinasi agar realisasi belanja modal ke depan dapat lebih terakselerasi.

Proyeksi capaian IKU per triwulanan dan keterkaitannya terhadap capaian target tahunan

Dengan tidak adanya lagi kebijakan penundaan ekspansi bagi BUMN di masa depan, intensitas koordinasi dan sinkronisasi dengan BUMN dalam pemantauan realisasi capex akan ditingkatkan, termasuk penguatan pemanfaatan data internal BUMN. Langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan realisasi capex, sehingga target tahunan dapat dikejar. Pada Triwulan III ditargetkan untuk melakukan monitoring baik capaian realisasi belanja modal maupun tingkat utilitas belanja tersebut selama semester I. Sedangkan pada Triwulan IV akan dilakukan monitoring dan evaluasi belanja modal sehingga diharapkan target tahunan dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Monitoring pencapaian belanja modal BUMN bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan Triwulan II Tahun 2026	Terlaksana	Telah diterima surat dari BP BUMN terkait realisasi capex triwulan 1 2026 dan target tahunan 2026 BUMN Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan No Surat S-6/DPN.BP/06/2026 tanggal 19 Juni 2026.

			Berdasarkan data per bulan Mei 2026 PTPN III, realisasi CAPEX untuk on farm sebesar Rp423,2 miliar (13,2% dari target) dan off farm sebesar Rp464,4 miliar (6,45% dari target).
2.	Koordinasi progres modernisasi pabrik gula di bawah SugarCo	Terlaksana	Telah dilakukan koordinasi dengan SugarCo atau PT SGN pada tgl 6 Juli 2026 secara online bahwa di Tahun 2026, bahwa kegiatan modernisasi yang dilakukan, antara lain perbaikan dan penggantian mesin baru di beberapa PG, antara lain: 1. Rendeng dan Mojo (Jawa Tengah). 2. Asembagus, Jatiroto, dan Industri Gula Glenmore (Jawa Timur). 3. Cinta Manis dan Bunga Mayang (Sumatera II).
3.	Koordinasi progres percepatan pembangunan pabrik mobil nasional	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat bersama Bappenas dan K/L Terkait Proyek Mobil Nasional dan Kaitannya dengan MRPN yang akan disusun oleh Bappenas pada tanggal 28 April 2026 serta telah

			dilaksanakan Rakor bersama Asdep ILMATEA terkait Program Mobnas yang membahas proses awal dan aturan TKDN yang akan diberlakukan pada tanggal 13 April 2026.
--	--	--	--

Upaya nyata untuk mencapai kinerja:

Koordinasi intensif dengan Kementerian BUMN, PT Danantara Asset Management, dan setiap BUMN untuk melakukan update berbagai tantangan pelaksanaan realisasi Capex dan mencari solusi atas tantangan tersebut. Setiap BUMN Agro juga perlu menyampaikan target dan realisasi Capex setiap triwulan sebagai upaya melakukan monitoring dan menyusun kebijakan yang diperlukan untuk percepatan realisasi Capex setiap perusahaan.

Efisiensi sumber daya:

Upaya memastikan penggunaan Capex dilakukan dengan baik melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi secara daring melalui aplikasi video conference sebagai langkah penghematan APBN yang diperkirakan mencapai Rp10.000.000,- hingga Rp25.000.000,- untuk setiap kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan melalui paket meeting. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lain yang sifatnya lebih strategis dan insidentil pada periode berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Penggunaan Capex PTPN III untuk kegiatan on farm, dilakukan untuk pengembangan komoditas kelapa sawit, karet, teh, kopi, dan aneka tanaman lain. Sedangkan penggunaan Capex untuk kegiatan off farm untuk pengelolaan perumahan karyawan, bangunan perusahaan, penyesialan dokumen HGU/sertifikasi, serta pemeliharaan mesin dan instalasi, jalan dan jembatan. Beberapa kendala dalam pencapaian target Capex BUMN Agro, khususnya PTPN III antara lain:

1. Realisasi pelaksanaan Capex dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas di beberapa anak perusahaan dengan mempertimbangkan cash flow perusahaan.
2. Dalam penggunaan Capex untuk kegiatan replanting kelapa sawit, terdapat kendala dalam proses penyelesaian dokumen legalitas dan perizinan.
3. Terdapat yang sifatnya teknis terkait kondisi surah hujan yang tinggi di beberapa lokasi yang dapat menghambat kegiatan pemupukan tanaman.
4. Beberapa penggunaan Capex untuk pengadaan pupuk dan sarana prasarana terkait masih dalam proses pengadaan.
5. Kendala proses pengadaan untuk melakukan penyusunan kajian terkait pengalihan saham PTPN III kepada PT SGN.

Upaya untuk melakukan perbaikan pencapaian target realisasi Capex, sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan percepatan penyelesaian legalitas lahan dan perizinan dengan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, dan Pemerintah Daerah terkait.
2. Perlu dilakukan upaya percepatan dalam proses pengadaan pupuk dan sarana prasarana terkait guna memastikan ketersediaan seluruh hal-hal yang terkait dalam pengelolaan lahan.
3. Perlu dilakukan percepatan pengadaan pihak ketiga yang akan menyusun kajian terkait pengalihan saham PTPN III pada PT SGN. Selain itu, perlu koordinasi dengan BP BUMN dan Danantara untuk percepatan proses pengalihan saham tersebut.

1.2. Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan

Latar Belakang

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disebutkan mengacu pada persentase penyelesaian penugasan pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan. Dalam hal ini, penekanan khusus diberikan pada percepatan penyelesaian penugasan kepada PTPN III (Persero) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023, yang bertujuan untuk mencapai swasembada gula nasional serta mendukung penyediaan Bioethanol sebagai bahan bakar nabati.

Penugasan pemerintah kepada PTPN III (Persero) yang dikoordinasikan diantaranya mencakup:

- a. Perluasan lahan tebu, dengan target 2026 sebesar **200.046 ha**
- b. Peningkatan produksi gula, dengan target 2026 sebesar **1,07 juta ton**
- c. Peningkatan rendemen gula, dengan target 2026 sebesar **7,35%**.

IKU ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kemandirian energi melalui optimalisasi produksi gula dan bioethanol. Jika target ini tercapai, dampaknya tidak hanya pada sektor pertanian dan energi, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Untuk mencapai target penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan dilakukan melalui: kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan penyusunan laporan dan/atau rekomendasi kebijakan penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan.

Target penugasan dikatakan tercapai apabila mencapai 80% dari target tahun 2026.

Persentase Penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan dihitung dengan.

Realisasi IKU 1.2

$$\text{Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah} = \frac{\text{Total Penugasan Pemerintah yang Diselesaikan}}{\text{Total Penugasan Pemerintah yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80%, penetapan target tahun 2026 didasarkan cascading direct dari target Deputy. Adapun target triwulan sebesar 25% ditetapkan berdasarkan persentase triwulan tahun-tahun sebelumnya.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 40,98% atau mencapai 51,23% dari target Tahun 2026 sebesar 80% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Persentase Penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan	Persentase	80%	40,98%	102,46%

Narasi tabel pengukuran kinerja dan data dukung capaian kinerja.

Penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan merupakan *cascading direct* dari IKU nasional dalam mendukung program prioritas nasional dengan target akhir sebesar 80% pada tahun 2026. Hingga akhir Triwulan II 2026, capaian mencapai 30,59%, menunjukkan progres yang konsisten dan terukur. Capaian ini didukung oleh penguatan koordinasi lintas K/L dan BUMN, serta pemantauan berkala oleh Kemenko Perekonomian.

Kualitas/dampak dari capaian kinerja

Capaian kinerja menunjukkan efektivitas sinergi kebijakan antara Kemenko Perekonomian, K/L teknis, Danantara, dan BUMN dalam pelaksanaan penugasan strategis. Dampaknya tercermin pada peningkatan efisiensi pelaksanaan program, percepatan realisasi target produksi, serta kontribusi sektor perekonomian dan pangan. Efisiensi sumber daya juga meningkat melalui integrasi program dan penghindaran duplikasi antar pelaksana.

Proyeksi capaian IKU per triwulanan dan keterkaitannya terhadap capaian target tahunan

Dengan capaian triwulan ini dan dukungan koordinasi yang semakin solid, proyeksi capaian IKU 1.2 pada akhir tahun 2026 diperkirakan dapat melebihi target capaian kinerja luas lahan di Tahun 2026. Berdasarkan hasil taksasi produksi awal giling Tahun 2026 yang dilakukan pada pertengahan bulan April 2026, proyeksi total produksi Gula Kristal Putih (GKP) PTPN III sebesar 1,05 juta ton dengan luas lahan tebu 205.865 Ha. Rencana kegiatan pada Triwulan III dan IV difokuskan

pada percepatan penugasan kepada PT Perkebunan Nusantara III dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi untuk menjaga konsistensi pelaksanaan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Persentase Penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi dan sinkronisasi data progres kebijakan percepatan swasembada gula oleh BUMN Agro	Terlaksana	Telah dilakukan Rapat Koodinasi dengan Kementerian/Lembag a (K/L) pada tanggal 16 April 2026 terkait proyeksi produksi Gula Kristal Putih (GKP) atau Gula Konsumsi Nasional. Total proyeksi GKP Nasional sebesar 3,04 juta ton, dimana proyeksi produksi GKP PTPN III sebesar 1,05 juta ton atau 34,62% dari total proyeksi GKP Tahun 2026.
2.	Monitoring kesiapan giling tebu dalam rangka percepatan swasembada gula	Terlaksana	Monitoring kesiapan dan pelaksanaan penugasan Swasembada Gula sampai TW II 2026 dilakukan secara daring pada tanggal 3 Juli 2026, yaitu total realisasi penugasan

			dan presentase terhadap target kinerja sebagai berikut: • Luas lahan tebu giling = 45.762 Ha (30,59%). • Produksi Gula = 179.884 ton (22,26%) • Rendemen = 6,12 (102,8%)
--	--	--	---

Upaya nyata untuk mencapai kinerja:

Koordinasi intensif dengan Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kantor Staf Kepresidenan, dan PT Perkebunan Nusantara III/ PT Sinergi Gula Nusantara untuk melakukan *update* berbagai tantangan pelaksanaan penugasan percepatan swasembada gula yang diberikan kepada PT Perkebunan Nusantara III/ PT Sinergi Gula Nusantara, serta melakukan mitigasi terhadap potensi terjadinya El Nino di Tahun 2026. Salah satu mitigasi yang dilakukan adalah pengaturan pola tanam, efisiensi penggunaan air, menjaga kelembapan tanah, dan melakukan pemupukan tanaman secara berimbang.

Efisiensi sumber daya:

Upaya memastikan pencapaian target pelaksanaan penugasan percepatan swasembada gula yang diberikan kepada PT Perkebunan Nusantara III/ PT Sinergi Gula Nusantara dapat dilakukan melalui Rapat Koordinasi secara daring dan kunjungan lapangan yang sangat selektif.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Kendala percepatan pelaksanaan penugasan swasembada gula:

- Triwulan II masih awal musim giling, sehingga produksi gula yang dihasilkan masih relatif rendah.
- Penggunaan benih tebu yang tahan terhadap kondisi kering, pengaturan pola tanam, dan efisiensi penggunaan air sebagai upaya mitigasi dalam menghadapi potensi terjadinya El Nino.
- Luas lahan tebu rakyat yang melakukan kemitraan dengan PTPN hanya sekitar 25% yang telah memasuki musim panen.
- Lahan tebu yang berada di areal Perhutani atau di luar areal HGU dan Tebu Rakyat, belum masuk musim panen atau giling.

Upaya perbaikan pencapaian target:

Berdasarkan identifikasi kendala serta capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026, dirumuskan sejumlah rekomendasi dan upaya perbaikan yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya guna memastikan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan. Upaya tersebut mencakup:

- Melakukan mitigasi dan koordinasi yang intensif dalam menghadapi terjadinya El Nino.
- Mengoptimalkan musim kemarau yang lebih panjang untuk meningkatkan mobilitas dan kegiatan yang mendukung mulai dari pemanenan, pengolahan, sampai dengan distribusi gula.
- Meningkatkan efisiensi pengelolaan kebun dengan mengimplementasikan digitalisasi pemetaan lahan melalui penggunaan drone dan pemetaan yang presisi.

2

Sasaran Kegiatan 2. Terjaganya Inflasi di Kisaran Sasaran

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terjaganya Inflasi di Kisaran Sasaran ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Tingkat Inflasi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Tingkat Inflasi

Latar Belakang

Inflasi adalah indikator ekonomi yang digunakan untuk menggambarkan kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Data inflasi sangat mempengaruhi pengambilan berbagai kebijakan nasional. Inflasi menjadi salah satu indikator asumsi ekonomi makro yang ditetapkan dalam APBN setiap tahunnya. Di tingkat nasional pemanfaatan data inflasi diantaranya sebagai alat penyesuaian tingkat upah, jaminan sosial, pembayaran bunga, dan nilai kontrak, yang pada akhirnya akan berdampak pada keuangan negara.

Tingkat inflasi nasional yang terjaga dalam kisaran sasaran mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, bahwa upaya pengendalian inflasi/stabilisasi harga berkaitan erat dengan tingkat kemiskinan, dimana pengeluaran tertinggi masyarakat miskin adalah untuk bahan pangan. Pada tahun 2026 sasaran inflasi ditetapkan sebesar $2,5\% \pm 1\%$ sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2026, Tahun 2026, dan Tahun 2027.

Dalam rangka memastikan pencapaian target inflasi di kisaran sasaran, dibutuhkan komitmen penuh dan sinergi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan pengendalian inflasi dapat berjalan secara optimal. Upaya dan komitmen tersebut dituangkan dalam program kerja TPIP dalam strategi utama 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) dengan target yang ditetapkan, sehingga mendukung pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

Dalam pelaksanaan proker TPIP, Asisten Deputi Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan sebagai wakil kepala sekretariat TPIP berperan dalam mengkoordinasikan program kebijakan yang berkaitan pengendalian inflasi dari Kementerian/Lembaga anggota TPIP maupun stakeholder strategis lainnya serta melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan pengendalian inflasi TPIP berjalan dengan efektif. Besaran Persentase inflasi yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2026 adalah: $2,5\% \pm 1\%$.

IKU Tingkat Inflasi dihitung dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yaitu indikator yang mengukur rata-rata perubahan harga dari sekumpulan barang dan jasa yang

dikonsumsi oleh rumah tangga. Perhitungan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Inflasi} = \frac{\text{IHK}_t - \text{IHK}_{t-1}}{\text{IHK}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

IHK_t: IHK periode ini

IHK_{t-1} = IHK periode sebelumnya

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 2,5% ± 1%, penetapan target tahunan dan triwulanan 2026 didasarkan pada Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026, dan Tahun 2027.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, tingkat inflasi sebesar 3,34% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Tingkat Inflasi	Persentase	2,5% ±1%	3,34%	100%

Tingkat inflasi merupakan *cascading direct* dari Indikator Tingkat Inflasi pada level Deputi yang ditargetkan sama-sama sebesar 2,5% ± 1%. Pada Juni 2026 terjadi inflasi sebesar 3,34% (mtm), atau masih terkendali dalam rentang sasaran. Inflasi Juni 2026 utamanya masih dipengaruhi oleh penyesuaian harga BBM nonsubsidi, gangguan pasokan beberapa komoditas pangan, serta dinamika permintaan domestik.

Inflasi pada tahun 2026 diperkirakan akan terkendali pada rentang sasaran dan berada pada titik tengah 2,70% (yoy) dengan batas atas 2,90% (yoy). Inflasi tahun 2026 diperkirakan akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global, kebijakan moneter bank sentral negara maju, fluktuasi harga komoditas global baik energi maupun pangan, serta kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi hasil produksi komoditas pangan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Tingkat Inflasi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan

			(Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja TPIP 2026 melalui strategi 4K	Terlaksana	Terlaksana pada pertemuan tanggal 23-25 April 2026
2.	Pelaksanaan proses evaluasi kinerja TPID tahun 2025 (TPID Award 2026)	Terlaksana	Telah dilaksanakan evaluasi kinerja TPID tahun 2025 (award 2026) ronde 2 tanggal 13-17 April 2026
3.	Penyiapan dan penyampaian laporan kepada Presiden terkait realisasi inflasi dan intervensi pemerintah TW I 2026	Terlaksana	Telah disusun dan disampaikan kepada Presiden melalui surat nomor : B/EKM.02.05/107A/M.EKON/04/2026
4.	Capacity Building TPID	Terlaksana	Telah dilaksanakan di beberapa daerah
5.	Penyusunan dan Penyampaian Laporan Analisis Inflasi Bulanan	Terlaksana	Telah dilaksanakan

Upaya nyata untuk mencapai kinerja:

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan capacity building dalam rangka pembinaan TPID maupun terkait evaluasi kinerja TPID.
2. Rangkaian proses pelaksanaan evaluasi kinerja TPID tahun 2025 telah dimulai sejak Januari 2026. Hingga Mei 2026 telah dilaksanakan verifikasi dokumen penilaian yang telah disampaikan oleh TPID melalui Surat Keputusan Kemenko Perekonomian yang ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2026 berdasarkan Berita Acara Nomor : BA-01/SET.TPIP/06/2026

Efisiensi sumber daya:

Penggunaan anggaran yang belum bisa dipakai dalam pelaksanaan tugas pengendalian inflasi berdampak pada menurunnya intensitas koordinasi, yang pada gilirannya membatasi optimalisasi peran Kemenko Perekonomian dalam mengawal terjaganya inflasi dalam kisaran sasaran. Inflasi Indonesia pada triwulan II terkendali dalam kisaran sasaran. Oleh karena itu, pergerakan harga pangan dijaga dalam rentang hasil kesepakatan HLM TPIP yakni 2-5%. Langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi guna menjaga inflasi dalam kisaran sasaran adalah dengan pelaksanaan kegiatan yang

mengoptimalkan ruang rapat kantor dan metode daring maupun hybrid melalui video conference. Proyeksi efisiensi diperkirakan mencapai Rp10.000.000,- hingga Rp25.000.000,- untuk setiap kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan melalui paket meeting.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Kendala pencapaian target:

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut :

Tekanan inflasi terutama berasal dari komponen volatile food dan administered prices, yang masih dipengaruhi oleh dinamika pasokan pangan, biaya transportasi, serta penyesuaian harga pada beberapa komoditas strategis.

Kelompok Volatile Food (VF) masih menjadi sumber utama tekanan inflasi. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 4,67% (yoy) dan memberikan andil terbesar terhadap inflasi nasional sebesar 1,36%. Tekanan inflasi didorong oleh kenaikan harga ikan segar, beras, minyak goreng, cabai merah, daging ayam ras, cabai rawit, bawang merah, daging sapi, dan jeruk. Secara bulanan, inflasi juga dipengaruhi oleh kenaikan harga bawang merah, bawang putih, beras, wortel, ikan segar, minyak goreng, cabai merah, dan daging sapi. Kondisi tersebut mengindikasikan masih adanya tantangan dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan, kelancaran distribusi, serta stabilisasi harga komoditas strategis, sehingga tekanan inflasi pangan masih relatif tinggi.

Kelompok Administered Prices (AP) juga memberikan tekanan terhadap inflasi, terutama dari kelompok transportasi yang mengalami inflasi 4,57% (yoy) dengan andil 0,55% terhadap inflasi nasional. Inflasi pada kelompok ini didorong oleh kenaikan harga bensin dan tarif angkutan udara, sedangkan secara bulanan kelompok transportasi mencatat inflasi 2,29% (mtm) yang menjadi penyumbang terbesar inflasi Juni 2026. Kondisi ini menunjukkan masih adanya tekanan pada biaya transportasi dan mobilitas masyarakat, yang berdampak pada peningkatan harga barang dan jasa. Selain itu, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga mengalami inflasi yang dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakar rumah tangga.

Di sisi lain, inflasi inti (core inflation) masih terjaga pada level 2,76% (yoy). Namun, inflasi harga bergejolak (volatile food) sebesar 5,58% (yoy) dan harga diatur pemerintah (administered prices) sebesar 3,42% (yoy) menunjukkan bahwa tekanan inflasi masih lebih banyak berasal dari faktor sisi penawaran (supply side) dibandingkan dari sisi permintaan. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan sinergi pengendalian inflasi melalui upaya menjaga pasokan, memperlancar distribusi, dan memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam stabilisasi harga pangan strategis.

Upaya perbaikan pencapaian target:

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, antara lain: melaksanakan program/kegiatan sesuai rencana aksi pada triwulan III Pelaksanaan Rapat Koordinasi

Nasional Pengendalian Inflasi, dan pelaksanaan rakor pusat dan daerah dengan substansi tematik per kawasan.

3

Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Implementasi Kebijakan Stimulus Ekonomi yang Optimal

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Implementasi Kebijakan Stimulus Ekonomi yang Optimal ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Kebijakan stimulus ekonomi yang terlaksana

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Persentase Kebijakan stimulus ekonomi yang terlaksana

Latar Belakang

Persentase Penyelesaian Kebijakan Stimulus Ekonomi yang Terlaksana adalah ukuran untuk menilai efektivitas dan kualitas pelaksanaan pemantauan serta evaluasi terhadap berbagai program stimulus ekonomi yang ditujukan untuk penguatan ekonomi masyarakat. Indeks ini mencerminkan sejauh mana proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara komprehensif, tepat waktu, akurat, dan menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan kebijakan.

IKU ini mengukur berbagai dimensi kualitas monitoring dan evaluasi, antara lain: (1) ketepatan waktu pelaporan dan pemantauan, (2) akurasi dan validitas data yang dikumpulkan, (3) cakupan dan kedalaman analisis terhadap dampak program, (4) kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan, serta (5) tingkat responsivitas dalam menindaklanjuti temuan evaluasi. Penilaian dilakukan melalui penilaian mandiri (self-assessment) dan verifikasi oleh tim independen terhadap dokumen monitoring, laporan evaluasi, serta implementasi tindak lanjut dari rekomendasi yang dihasilkan.

Dalam pelaksanaannya, Asisten Deputi yang membidangi stimulus ekonomi berperan dalam mengkoordinasikan proses monitoring dan evaluasi bersama Kementerian/Lembaga pelaksana program stimulus, melakukan analisis capaian dan dampak program, serta menyusun rekomendasi perbaikan kebijakan. Koordinasi lintas K/L diperlukan untuk memastikan data dan informasi yang komprehensif dapat dikumpulkan dan dianalisis secara holistik.

IKU Persentase Kebijakan Stimulus Ekonomi yang Terlaksana dihitung dengan pembobotan beberapa indikator, di antaranya ketepatan waktu, akurasi data, dan analisis dampak. Perhitungan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dengan formula sebagai berikut:

Realisasi IKU 3.1 = (Skor Ketepatan Waktu × 20%) + (Skor Akurasi Data × 25%) + (Skor Analisis Dampak × 25%) + (Skor Kualitas Rekomendasi × 20%) + (Skor Responsivitas Tindak Lanjut × 10%)

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80%, penetapan persentase penyelesaian kebijakan peningkatan akselerasi ekonomi tahun 2026 sebesar 80% didasarkan pada cascading dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN. Adapun target triwulan II sebesar 80%.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Penyelesaian Kebijakan Peningkatan Akselerasi Ekonomi yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 80% atau mencapai 100% dari target Tahun 2026 sebesar 80% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Persentase Penyelesaian Kebijakan Peningkatan Akselerasi Ekonomi	Persentase	80%	80%	100%

Narasi tabel pengukuran kinerja dan data dukung capaian kinerja.

Realisasi kinerja **IKU-3.1 (Persentase Penyelesaian Kebijakan Peningkatan Akselerasi Ekonomi)** pada Triwulan II berhasil mencapai **80%** dari target yang ditetapkan sebesar **80%**. Dengan capaian sebesar **100%**, indikator ini mendapatkan predikat **"Memuaskan"** yang mencerminkan efektivitas organisasi dalam menyusun, menyelesaikan, dan mengawal regulasi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Keberhasilan capaian ini didukung oleh beberapa **Data Dukung** utama, yaitu:

- **Aspek Kebijakan:** Salinan draf regulasi, surat keputusan, atau paket kebijakan ekonomi yang telah diselesaikan dan disahkan pada Tw I.
- **Aspek Koordinasi:** Undangan rapat, daftar hadir, foto dokumentasi, serta Notulen Rapat (Minutes of Meeting) penyusunan kebijakan bersama kementerian/lembaga terkait.
- **Aspek Pengendalian:** Laporan progres penyelesaian produk hukum/kebijakan serta matriks pemantauan implementasi akselerasi ekonomi di lapangan.

Kualitas/dampak dari capaian kinerja

Dari sisi kualitas, penyelesaian kebijakan ini tidak sekadar memenuhi target administratif, melainkan menghasilkan regulasi yang komprehensif, inklusif, dan aplikatif. Proses penyusunannya didukung oleh kajian akademis yang matang, pelibatan aktif pemangku kepentingan (*stakeholders Engagement*), serta penyelarasan yang kuat dengan arah pembangunan nasional. Hal ini menghasilkan produk kebijakan yang memiliki kepastian hukum tinggi, adaptif terhadap dinamika global, serta siap diimplementasikan tanpa menimbulkan hambatan di tingkat teknis

Proyeksi capaian IKU per triwulanan dan keterkaitannya terhadap capaian target tahunan

- Triwulan I: Target triwulanan telah tercapai sebesar 80% sesuai dengan rencana kinerja yang ditetapkan.
- Triwulan II dan III: Target triwulanan dapat tercapai sebesar 80% sesuai dengan rencana kinerja yang ditetapkan. Difokuskan pada pengawalan implementasi kebijakan stimulus ekonomi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, identifikasi isu

strategis, serta penyusunan rekomendasi kebijakan guna memastikan target tahunan tetap berada pada jalur pencapaian.

- Triwulan IV: Target triwulanan dapat tercapai sebesar 80% sesuai dengan rencana kinerja yang ditetapkan. Difokuskan pada penyelesaian monitoring dan evaluasi tahunan, finalisasi rekomendasi kebijakan, serta pemenuhan target IKU tahun 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Persentase Penyelesaian Kebijakan Peningkatan Akselerasi Ekonomi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Rapat koordinasi terkait stimulus ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Tw II	Terlaksana	1. Rapat Internal Pembahasan Pokja Pertumbuhan Ekonomi 21 April 2026 2. Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Program Pemerintah Untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi – 22 April 2026 3. Rapat Internal Pembahasan Kurs dan Insentif Bea Masuk Pelastik – 26 April 2026 4. Rapat Koordinasi Akselerasi

			Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II – 2026 – 12 Mei 2026 5. Rapat Koordinasi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II – 2026 (Program Prioritas) – 18 Mei 2026 6. Rapat Koordinasi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II – 2026 (KDMP dan Bansos) – 22 Mei 2026 7. Rapat Koordinasi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II – 2026 melalui Percepatan Realisasi Belanja K/L – 4 Juni 2026 8. Rapat Koordinasi Update Kesiapan Pelaksanaan Paket Stimulus Triwulan II/Semester 2 – 5 Juni 2026 9. Rapat Pembahasan Indonesia Country Growth and Jobs Report
--	--	--	--

			Policy Matrix – 25 Juni 2026
2.	FGD dengan Ekonom terkait stimulus ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Terlaksana	1. Diskusi Terfokus komunikasi publik dan finalisasi dokumen manual IKU dan Renaksi tanggal 15 April 2026 2. FGD "Geopolitik Memanas, Ekonomi Global Tertekan : Kemana Arah Indonesia? Tanggal 22-23 April 2026
3.	Kegiatan Policy Outreach Forum: Kebijakan Ekonomi Berkualitas dan Peningkatan Produktivitas SDM Muda Unggul	Terlaksana	1. Policy Outreach Forum di Universitas Tanjungpura, Pontianak pada tanggal 8 Mei 2026 2. Policy Outreach Forum di Universitas Lampung pada tanggal 12 Mei 2026

Upaya nyata untuk mencapai kinerja:

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga pelaksana guna memastikan kesiapan implementasi kebijakan stimulus ekonomi sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan stimulus ekonomi serta menyusun rekomendasi tindak lanjut sebagai dasar penyempurnaan pelaksanaan kebijakan.

Efisiensi sumber daya:

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia melalui koordinasi lintas Kementerian/Lembaga, penggunaan forum koordinasi yang telah ada, serta pemanfaatan media rapat daring dan luring sesuai kebutuhan. Pendekatan tersebut memungkinkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi berjalan secara efektif dan efisien tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang

signifikan. Sinergi antar Kementerian/Lembaga juga menghindari duplikasi pembahasan dan meningkatkan efektivitas proses pengambilan keputusan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Kendala pencapaian target:

Sepanjang Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut :

- Perbedaan tingkat kesiapan Kementerian/Lembaga dalam penyampaian data dan informasi pelaksanaan kebijakan stimulus ekonomi.
- Dinamika perkembangan kondisi ekonomi serta perubahan kebutuhan kebijakan yang memerlukan penyesuaian dan koordinasi lintas sektor secara cepat.

Upaya perbaikan pencapaian target:

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, antara lain:

- Meningkatkan intensitas koordinasi, memperkuat koordinasi sejak tahap perencanaan sehingga potensi permasalahan implementasi dapat diidentifikasi lebih awal, dan monitoring bersama Kementerian/Lembaga pelaksana guna memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai rencana.
- Memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi melalui penyempurnaan sistem pelaporan, percepatan penyampaian data, serta peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program.

4

Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan yang berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan yang berkualitas yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian enam indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Bahan Baku Obat (BBO) oleh BUMN
2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan industri baja oleh BUMN
3. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Sumber Bahan Baku Berbasis Tebu
4. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stabilitas Harga
5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Sektor Eksternal
6. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Program Stimulus Ekonomi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, Latar Belakang

**dan Pengendalian Kebijakan
Bahan Baku Obat (BBO)
oleh BUMN**

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Bahan Baku Obat (BBO) oleh BUMN. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.

Kebijakan yang dikoordinasikan dalam rangka mencapai Persentase Efektivitas Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bahan Baku Obat (BBO) oleh BUMN yaitu:

- Sinkronisasi roadmap dan target kemandirian BBO nasional melalui forum koordinasi antar-K/L dan BUMN
- Penguatan peran Holding BUMN Farmasi (Bio Farma, Kimia Farma, dan Indofarma) dalam pengembangan dan investasi BBO strategis;
- Fasilitasi percepatan proyek produksi BBO di dalam negeri, seperti operasionalisasi pabrik BBO PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP) dan perluasan kapasitas produksi BBO;
- Pengendalian pelaksanaan kebijakan melalui pemantauan dan evaluasi capaian produksi, efisiensi rantai pasok, dan utilisasi kapasitas industri BBO milik BUMN;
- Tugas atau fungsi lainnya adalah tugas di luar poin di atas, sebagai tindak lanjut arahan presiden atau menteri pada tahun berjalan (ad hoc).

Adapun nilai dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan usaha BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 1 adalah undangan, daftar hadir, dan/atau notula rapat tentang identifikasi isu strategis kebijakan BBO (1 paket dokumen).

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan

dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program \
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 2 adalah laporan hasil rapat koordinasi dengan K/L teknis & BUMN dalam rangka debottlenecking permasalahan terkait kebijakan BBO (1 paket dokumen).

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- Rumusan kelembagaan,
- Rumusan perencanaan program,
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Implementasi Kebijakan terkait BBO (1 paket dokumen).

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi terkait kebijakan BBO (1 paket dokumen).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada perkiraan dan target kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2026. Adapun target triwulan sebesar 20% untuk triwulan II, 40% untuk triwulan III, 60% untuk triwulan IIII, dan 80% untuk triwulan IIV.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Bahan Baku Obat (BBO) oleh BUMN yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 20% atau mencapai 20% dari target Tahun 2026 sebesar 80% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU-4.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Bahan Baku Obat (BBO) oleh BUMN	Persentase	40%	40%	100% (Memuaskan)

Narasi tabel pengukuran kinerja dan data dukung capaian kinerja.

Realisasi kinerja **IKU-4.1 (Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Bahan Baku Obat (BBO) oleh BUMN)** pada Triwulan II berhasil mencapai **40%** dari target yang ditetapkan sebesar **40%**. Dengan capaian sebesar **100%**, indikator ini mendapatkan predikat **"Memuaskan"** yang mencerminkan efektivitas organisasi dalam menyelaraskan dan mengendalikan kebijakan kemandirian serta ketersediaan bahan baku obat nasional melalui BUMN.

Keberhasilan capaian ini didukung oleh beberapa **Data Dukung** utama, yaitu:

- **Aspek Kebijakan:** Salinan regulasi, rencana aksi, atau instrumen kebijakan resmi terkait percepatan kemandirian dan tata kelola Bahan Baku Obat (BBO) oleh BUMN farmasi pada Tw II.
- **Aspek Koordinasi:** Undangan rapat, daftar hadir, foto dokumentasi, serta Notulen Rapat (Minutes of Meeting) koordinasi berkala bersama jajaran klaster BUMN farmasi, kementerian kesehatan/teknis, dan BPOM.
- **Aspek Pengendalian:** Laporan monitoring progres riset/produksi BBO dalam negeri, evaluasi serapan bahan baku, serta matriks pengendalian implementasi kebijakan BBO di lapangan.

Kualitas/dampak dari capaian kinerja

Sinkronisasi kebijakan mendorong peningkatan kapasitas produksi BBO domestik oleh BUMN, sehingga secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan ekstrem Indonesia terhadap impor bahan baku farmasi global. Dampak jangka panjangnya adalah terciptanya stabilitas pasokan obat-obatan nasional, penurunan biaya produksi obat yang membuat harga obat lebih terjangkau bagi masyarakat luas, serta peningkatan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi krisis kesehatan di masa depan.

Proyeksi capaian IKU per triwulanan dan keterkaitannya terhadap capaian target tahunan

- **Triwulan I:** Telah dilakukan koordinasi awal melalui rapat program kerja dengan PT IHC (27 Februari 2025).
- **Triwulan II:** Telah dilakukan berbagai rapat di bidang BBO, fitofarmaka, dan pengembangan daya saing obat tradisional guna memperoleh alternatif rekomendasi kebijakan terkait.
- **Triwulan III–IV:** Akan difokuskan pada koordinasi lebih lanjut dan monitoring realisasi belanja modal serta pendalaman kebijakan fiskal/insentif untuk mendukung pengembangan BBO, termasuk fitofarmaka dan daya saing obat tradisional.

Pencapaian ini mencerminkan kemajuan signifikan indikator efektivitas sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, dengan proyeksi target tahunan tetap di jalur, terutama bila didukung tindak lanjut kebijakan pada semester II.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Bahan Baku Obat (BBO) oleh BUMN			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penyusunan alternatif	Terlaksana	Telah disampaikan masukan dan tanggapan

	rekomendasi kebijakan Pengembangan Bahan Baku Obat		atas RPermenko dan Usulan Rencana Aksi terkait Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan melalui Nota Dinas nomor BUM.03/51/D.I.M.EKON.4/04/2026 tanggal 14 April 2026
2.	Penguatan BUMN di Wisata Medis	Terlaksana	Telah dilaksanakan pembahasan mengenai posisi pemerintah dalam mendorong pengembangan <i>medical tourism</i> di Indonesia, serta menindaklanjuti perkembangan operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur, khususnya terkait posisi strategis Bali International Hospital (BIH) sebagai flagship layanan kesehatan berstandar internasional. Waktu dan tempat: Kamis, 23 April 2026 (Pukul 13.00 - selesai). Ruang Rapat Biro Umum 4, Gedung Pos, Lantai 6, Jakarta.
3.	Koordinasi kebijakan GERMAS bersama Bappenas dan lintas K/L	Terlaksana	Rekomendasi kebijakan diarahkan pada penguatan integrasi GERMAS dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah, harmonisasi program lintas K/L, peningkatan peran BUMN dan dunia usaha dalam promosi kesehatan preventif, penguatan indikator pemantauan dan evaluasi, serta optimalisasi dukungan pembiayaan dan kampanye perubahan perilaku masyarakat, guna meningkatkan kualitas hidup, produktivitas SDM, dan ketahanan kesehatan nasional.

Upaya nyata untuk mencapai kinerja:

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah:

1. Menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan di BRMP TROA pada 29 April 2026. Rapat tersebut bertujuan menjaring informasi dan perkembangan industri farmasi dan alat kesehatan di tingkat daerah, mendorong peningkatan nilai tambah komoditas lokal berbasis biofarmaka, serta mengidentifikasi strategi tindak lanjut implementasi PP Nomor 28 Tahun 2024 terkait penguatan industri farmasi dan alat kesehatan nasional.

Efisiensi sumber daya:

Kegiatan sebagian besar dilaksanakan secara virtual melalui platform Zoom Meeting, sehingga mampu menekan biaya perjalanan dinas dan penggunaan sumber daya lainnya, namun tetap memastikan partisipasi aktif dan efektivitas pencapaian tujuan kegiatan. Proyeksi efisiensi diperkirakan mencapai Rp10.000.000,- hingga Rp25.000.000,- untuk setiap kegiatan. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lain yang sifatnya lebih strategis dan insidental pada periode berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Kendala pencapaian target:

Beberapa kendala utama dalam pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan BBO oleh BUMN pada Triwulan II adalah sebagai berikut:

- **Standardisasi dan sertifikasi bahan baku tanaman obat BRMP.** TROA menekankan pentingnya GAP, standardisasi, dan sertifikasi. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan kualitas bahan baku di lapangan kemungkinan masih menjadi tantangan.
- **Rantai pasok domestik yang belum sepenuhnya kuat.** Adanya dorongan untuk kemitraan inti-plasma dan penguatan rantai pasok mengindikasikan bahwa rantai pasok bahan baku obat nasional belum optimal.
- **Potensi Indonesia dalam pengembangan obat herbal dan fitofarmaka juga belum dimanfaatkan secara maksimal.** Meski memiliki sumber daya alam melimpah dan pengetahuan tradisional, belum ada kebijakan terpadu yang menjadikan sektor ini sebagai salah satu fokus pengembangan industri farmasi nasional.

Upaya perbaikan pencapaian target:

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2024, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, antara lain

- Memperkuat rantai pasok bahan baku tanaman obat.
- Integrasi data BRMP TROA dengan data BUMN, Kemenperin, Kemenkes, dan pemerintah daerah.
- Menghubungkan riset BRMP TROA dengan kebutuhan industri farmasi dan alat kesehatan.

4.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Industri Baja, Otomotif, dan Semikonduktor oleh BUMN

Latar Belakang

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan industri baja oleh BUMN. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.

Industri baja merupakan sektor strategis yang menjadi fondasi pembangunan infrastruktur, industri manufaktur, alat berat, pertahanan, dan sektor konstruksi nasional. Dalam konteks ini, kebijakan industri baja diarahkan untuk memperkuat kemandirian industri hulu dan antara, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta meningkatkan daya saing produk baja nasional. Kebijakan yang dikoordinasikan dalam rangka mencapai Persentase Efektivitas Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan industri baja oleh BUMN, yaitu:

- Sinkronisasi kebijakan pengembangan industri baja nasional yang melibatkan BUMN strategis seperti PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan anak usahanya;
- Melakukan pemantauan dan koordinasi atas proses restrukturisasi dan transformasi bisnis PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, guna mendukung peningkatan efisiensi operasional, perbaikan kinerja keuangan, serta optimalisasi kapasitas produksi industri baja nasional ;
- Koordinasi kebijakan penguatan ekosistem industri baja nasional, termasuk pengembangan klaster baja hulu serta baja hilir bernilai tambah;

Adapun nilai dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan usaha BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan.

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 1 adalah undangan, daftar hadir, dan/atau notula rapat tentang identifikasi isu strategis kebijakan industri baja (1 paket dokumen).

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 2 adalah laporan hasil rapat koordinasi dengan K/L teknis & BUMN dalam rangka debottlenecking permasalahan terkait kebijakan industri baja (1 paket dokumen).

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- rumusan perencanaan program,
- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Implementasi Kebijakan terkait industri baja(1 paket dokumen).

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi terkait kebijakan industri baja (1 paket dokumen).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada perkiraan dan target kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2026. Adapun target triwulan sebesar 20% untuk triwulan II, 40% untuk triwulan III, 60% untuk triwulan IIII, dan 80% untuk triwulan IIV.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan industri baja oleh BUMN yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 20% atau mencapai 20% dari target Tahun 2026 sebesar 80% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU-4.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Industri Baja, Otomotif, dan Semikonduktor oleh BUMN	Persentase	40%	40%	100 % (Memuaskan)

Narasi tabel pengukuran kinerja dan data dukung capaian kinerja.

Realisasi kinerja **IKU-4.2 (Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Industri Baja, Otomotif, dan Semikonduktor oleh BUMN)** pada Triwulan II berhasil mencapai **40%** dari target yang ditetapkan sebesar **40%**. Dengan capaian sebesar **100%**, indikator ini mendapatkan predikat **"Memuaskan"** yang mencerminkan efektivitas organisasi

dalam menyelaraskan dan mengendalikan kebijakan pengembangan industri strategis tersebut.

Keberhasilan capaian ini didukung oleh beberapa **Data Dukung** utama, yaitu:

- **Aspek Kebijakan:** Salinan regulasi, keputusan, atau instrumen kebijakan resmi terkait peta jalan (roadmap) dan pengembangan industri baja, otomotif, serta semikonduktor yang melibatkan BUMN pada Tw II.
- **Aspek Koordinasi:** Undangan rapat, daftar hadir, foto dokumentasi, serta Notulen Rapat (Minutes of Meeting) koordinasi bersama kementerian teknis, jajaran direksi BUMN terkait, dan mitra industri.
- **Aspek Pengendalian:** Laporan monitoring perkembangan industri strategis berkala, evaluasi hambatan investasi/produksi, serta matriks pengendalian implementasi kebijakan di lapangan.

Kualitas/dampak dari capaian kinerja

Penyelarasan kebijakan ini memperkuat kemandirian industri nasional melalui peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor strategis, serta memitigasi risiko kelangkaan komponen global seperti cip semikonduktor. Capaian ini juga memperkuat policy alignment antara pemerintah dan BUMN dalam menghadapi tekanan pasar global dan mempercepat transformasi industri baja berbasis efisiensi dan teknologi rendah karbon (green steel).

Proyeksi capaian IKU per triwulanan dan keterkaitannya terhadap capaian target tahunan

Realisasi Triwulan II 2026 sebesar 40%, sesuai dengan target triwulan yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan efektivitas koordinasi awal lintas K/L dan BUMN terkait, sebagai fondasi untuk memperkuat formulasi kebijakan dan implementasi program di triwulan berikutnya

- **Triwulan I:** Telah dicapai 1 kegiatan koordinasi strategis utama (rapat program kerja PTKS), yang berkontribusi terhadap awal pemetaan isu dan rencana aksi kebijakan industri baja nasional.
- **Triwulan II dan III:** Akan difokuskan pada pelaksanaan *follow-up meeting* dengan BUMN industri sektor baja di sisi hilir, serta penyusunan rekomendasi kebijakan dan mekanisme pengendalian impor bersama K/L teknis dan asosiasi industri.
- **Triwulan IV:** Ditargetkan adanya finalisasi kebijakan strategis dan pemantauan implementasi awal, termasuk integrasi data utilisasi BUMN industri baja dan pelaporan sinkronisasi lintas pihak.

Dengan pendekatan ini, **target tahunan IKU diproyeksikan tercapai**, mengingat bahwa pertemuan strategis di awal tahun telah membuka jalur koordinasi substansial dan berkelanjutan, serta mendorong perumusan kebijakan berbasis data dan kebutuhan aktual industri.

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

4.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan industri baja oleh BUMN			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi awal untuk penyelarasan arah kebijakan penguatan industri manufaktur prioritas serta keterkaitan hulu-hilir antara industri baja, otomotif, dan semikonduktor	Terlaksana	Telah dilakukan rapat pembahasan proyek mobnas MRPN dengan Bappenas dan Rapat Koordinasi bersama Asdep ILMATEA pada tanggal 28 April 2026 untuk pembahasan rincian tahapan pada objek pengendalian mobil nasional serta pendetailan kerangka proyek PSN Mobil Nasional
2.	Penyusunan alternatif pelaksanaan program strategis BUMN pada sektor industri baja, otomotif, dan semikonduktor	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rakor Proyek Mobil Nasional bersama Asdep ILMATEA Kemenko Perekonomian pada tanggal 13 April 2026 untuk membahas ketentuan industri manufaktur terutama TKDN terkait proyek mobil nasional
3.	Penyusunan alternatif rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi implementasi kebijakan penguatan industri manufaktur prioritas oleh BUMN	Terlaksana	Dari hasil diskusi yang sudah dilakukan Kemenko Perekonomian memberikan rekomendasi insentif-insentif fiskal yang sekiranya dapat diajukan kepada Pemerintah oleh PT Pindad dalam pelaksanaan proyek mobil nasional.

Upaya nyata untuk mencapai kinerja:

Selain pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan, upaya nyata yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja pada Triwulan II adalah melalui **penyelenggaraan rapat koordinasi Program Mobil Nasional** bersama kementerian/lembaga terkait, PT Pindad, dan Bappenas. Pembahasan difokuskan pada **penyelarasan arah kebijakan pengembangan Mobil**

Nasional, kejelasan peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam ekosistem proyek, perkembangan usulan status **Proyek Strategis Nasional (PSN)**, serta identifikasi kebutuhan dukungan kebijakan, antara lain insentif fiskal, peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan skema dukungan pembiayaan. Selain itu, dilakukan pemantauan terhadap progres pengembangan proyek oleh PT Pindad, termasuk benchmarking pengembangan produk, penyusunan roadmap kendaraan, serta tindak lanjut proses penyediaan lahan dan dukungan penyertaan modal negara (PMN). Hasil koordinasi tersebut menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan penguatan sinergi lintas kementerian/lembaga guna mendukung percepatan implementasi Program Mobil Nasional.

Efisiensi sumber daya:

Pelaksanaan rapat koordinasi Program Mobil Nasional pada Triwulan II sebagian besar dilaksanakan secara **hybrid** dan **daring** melalui platform Zoom untuk mengakomodasi partisipasi kementerian/lembaga, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya tanpa memerlukan perjalanan dinas secara keseluruhan. Mekanisme ini mendukung efisiensi penggunaan anggaran dan waktu koordinasi, sekaligus memungkinkan pembahasan isu-isu strategis seperti pengembangan roadmap Mobil Nasional, status Proyek Strategis Nasional (PSN), dukungan insentif fiskal, peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta kebutuhan dukungan pembiayaan dapat dilakukan secara lebih fleksibel dan tepat waktu. Proyeksi efisiensi biaya diperkirakan mencapai **Rp10.000.000,- hingga Rp25.000.000,-** untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan secara daring dibandingkan penyelenggaraan rapat tatap muka penuh. Pemanfaatan teknologi komunikasi tersebut tetap mampu menghasilkan koordinasi yang efektif, mempercepat pertukaran informasi antar pemangku kepentingan, serta mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan secara lebih efisien.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Kendala pencapaian target:

Beberapa kendala utama dalam pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan Program Mobil Nasional pada Triwulan II adalah sebagai berikut:

- **Belum optimalnya sinkronisasi peran dan kewenangan antar kementerian/lembaga** dalam pengembangan Program Mobil Nasional, sehingga masih diperlukan penyamaan persepsi mengenai peran masing-masing instansi dalam mendukung implementasi program.
- **Masih berprosesnya penyusunan dan harmonisasi kebijakan pendukung**, termasuk terkait insentif fiskal, pengembangan kendaraan listrik nasional, dan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sehingga memerlukan koordinasi lanjutan dengan kementerian/lembaga terkait.
- **Masih berlangsungnya proses penyiapan dukungan implementasi proyek**, antara lain terkait penyediaan lahan, dukungan pembiayaan, serta penetapan status Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga beberapa tahapan pengembangan belum dapat dilaksanakan secara optimal.

- **Perlunya penyelarasan roadmap pengembangan produk dan kebutuhan industri** antara PT Pindad dengan kementerian/lembaga terkait, agar dukungan kebijakan yang diberikan sesuai dengan tahapan pengembangan Mobil Nasional dan target implementasi yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk upaya perbaikan, **Kemenko Perekonomian melalui Asdep Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan** terus memfasilitasi koordinasi lintas kementerian/lembaga, BUMN, dan pemangku kepentingan terkait untuk menyelaraskan arah kebijakan, mengidentifikasi kebutuhan dukungan regulasi dan insentif, serta mempercepat penyelesaian isu-isu strategis yang menjadi prasyarat implementasi Program Mobil Nasional. Hasil koordinasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan guna mendukung percepatan pengembangan industri kendaraan nasional.

Upaya perbaikan pencapaian target:

Sebagai tindak lanjut atas berbagai kendala yang diidentifikasi, berikut merupakan rumusan rekomendasi dan upaya perbaikan untuk meningkatkan efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan Program Mobil Nasional:

- **Memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan BUMN** dalam rangka menyelaraskan peran, tugas, dan mekanisme pelaksanaan Program Mobil Nasional sehingga tercipta tata kelola yang lebih terintegrasi.
- **Mendorong percepatan harmonisasi kebijakan pendukung**, khususnya terkait pengembangan kendaraan listrik nasional, peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta penyusunan skema insentif fiskal yang sesuai dengan tahapan pengembangan produk.
- **Melakukan koordinasi lanjutan dengan Bappenas, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan PT Pindad** untuk memantau perkembangan usulan Proyek Strategis Nasional (PSN), kesiapan implementasi proyek, serta penyelesaian isu lintas sektor yang memerlukan dukungan pemerintah.
- **Mendorong penyusunan roadmap implementasi Program Mobil Nasional yang terintegrasi**, meliputi tahapan pengembangan produk, pembangunan fasilitas produksi, kebutuhan regulasi, dan dukungan pembiayaan sebagai acuan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan.
- **Meningkatkan pertukaran data dan informasi** antar kementerian/lembaga dan PT Pindad guna mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) serta memastikan pengambilan keputusan dilakukan secara tepat waktu.

4.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan

Latar Belakang

Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait peningkatan sumber bahan baku berbasis tebu merupakan alat ukur untuk mengetahui sejauh mana proses perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian

**terkait Peningkatan
Sumber Bahan Baku
Berbasis Tebu**

kebijakan lintas sektor dilakukan secara terkoordinasi dan selaras dalam mendukung ketersediaan bahan baku tebu nasional.

Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan dikategorikan efektif apabila rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari proses tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemangku kepentingan terkait, serta tercermin dalam dukungan nyata terhadap program peningkatan produksi dan/atau penyerapan bahan baku tebu dalam negeri.

Hasil dari proses ini selanjutnya dievaluasi melalui penyusunan laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) secara berkala, yang mencakup capaian implementasi kebijakan, hambatan pelaksanaan, dan langkah korektif untuk optimalisasi kebijakan.

Kebijakan yang dikoordinasikan dalam rangka mencapai Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Sumber Bahan Baku Berbasis Tebu, yaitu:

- **Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Penyediaan Bahan Baku Etanol Berbasis Tebu oleh PTPN III** melalui koordinasi lintas pihak, dilakukan identifikasi tantangan serta penyusunan langkah percepatan penyediaan bahan baku tebu untuk etanol di lahan milik PTPN III.
- **Identifikasi dan Pemetaan Potensi Lahan (HGU dan non-HGU).** Upaya ini dilakukan untuk merumuskan rekomendasi pemanfaatan lahan secara optimal bagi pengembangan tebu, termasuk lahan eksisting dan non-HGU yang strategis.
- **Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Eksisting.** Dilakukan monitoring terhadap penggunaan lahan eksisting PTPN III untuk memastikan dukungan terhadap produksi bahan baku etanol berbasis tebu yang berkelanjutan.
- **Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan.** Koordinasi dengan K/L dan pemangku kepentingan lainnya dilakukan untuk memastikan keselarasan kebijakan tata guna lahan, pengelolaan HGU, serta dukungan fiskal atau teknis terhadap program peningkatan produksi tebu nasional.
- **Evaluasi Kebijakan Tahunan.** Evaluasi akhir tahun dilaksanakan untuk mengkaji capaian, hambatan, serta rekomendasi tindak lanjut atas pelaksanaan kebijakan penyediaan bahan baku tebu oleh PTPN III, yang hasilnya menjadi bagian dari indikator efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan.

Adapun nilai dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan usaha BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.

**Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/
Permasalahan**

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan.

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 1 adalah undangan, daftar hadir, dan/atau notula rapat tentang identifikasi isu strategis kebijakan Peningkatan Sumber Bahan Baku Berbasis Tebu (1 paket dokumen).

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 2 adalah laporan hasil rapat koordinasi dengan K/L teknis & BUMN dalam rangka debottlenecking permasalahan terkait kebijakan Peningkatan Sumber Bahan Baku Berbasis Tebu (1 paket dokumen).

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- rumusan perencanaan program,
- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Implementasi Kebijakan terkait Peningkatan Sumber Bahan Baku Berbasis Tebu (1 paket dokumen).

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permen/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi terkait kebijakan Peningkatan Sumber Bahan Baku Berbasis Tebu (1 paket dokumen).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada perkiraan dan target kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2026. Adapun target triwulan sebesar 20% untuk triwulan II, 40% untuk triwulan III, 60% untuk triwulan IIII, dan 80% untuk triwulan IIV.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Sumber Bahan Baku Berbasis Tebu yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 40% atau mencapai 50% dari target triwulanan Tahun 2026 sebesar 80% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU-4.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian	Persentase	40%	40%	100% (Memuaskan)

Kebijakan terkait Peningkatan Sumber Bahan Baku Berbasis Tebu				
---	--	--	--	--

Narasi tabel pengukuran kinerja dan data dukung capaian kinerja

Realisasi kinerja **IKU-4.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Sumber Bahan Baku Berbasis Tebu** pada Triwulan II berhasil mencapai **40%** dari target yang ditetapkan sebesar **40%**. Dengan capaian sebesar **100%**, indikator ini mendapatkan predikat **"Memuaskan"** yang mencerminkan efektivitas organisasi dalam menyelaraskan dan mengendalikan kebijakan peningkatan sumber bahan baku berbasis tebu.

Keberhasilan capaian ini didukung oleh beberapa **Data Dukung** utama, yaitu:

- **Aspek Kebijakan:** Salinan regulasi, surat keputusan, atau instrumen kebijakan resmi terkait program peningkatan dan pengembangan sumber bahan baku tebu.
- **Aspek Koordinasi:** Undangan rapat, daftar hadir, foto dokumentasi, serta Notulen Rapat (Minutes of Meeting) koordinasi bersama para pemangku kepentingan (seperti petani, pabrik gula, atau instansi terkait).
- **Aspek Pengendalian:** Laporan monitoring luasan lahan/produksi tebu berkala, evaluasi pasokan, serta matriks pengendalian implementasi kebijakan komoditas tebu di lapangan.

Kualitas/dampak dari capaian kinerja

Rumusan kebijakan dan bahan evaluasi yang dihasilkan menjadi acuan bersama dalam mendukung program peningkatan bahan baku berbasis tebu. Dampak dari capaian kinerja tersebut adalah terbangunnya kesepahaman lintas sektor, penguatan arah kebijakan, dan kesiapan implementasi program strategis berbasis tebu.

Proyeksi capaian IKU per triwulanan dan keterkaitannya terhadap capaian target tahunan

Realisasi Triwulan II 2026 sebesar 40%, sesuai dengan target triwulan yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan efektivitas koordinasi awal lintas K/L dan BUMN terkait, sebagai fondasi untuk memperkuat formulasi kebijakan dan implementasi program di triwulan berikutnya.

- **Triwulan I:** Telah dicapai 1 kegiatan koordinasi strategis utama (rapat program kerja PTKS), yang berkontribusi terhadap awal pemetaan isu dan rencana aksi kebijakan industri baja nasional.
- **Triwulan II dan III:** Akan difokuskan pada pelaksanaan *follow-up meeting* dengan BUMN industri sektor baja di sisi hilir, serta penyusunan rekomendasi kebijakan dan mekanisme pengendalian impor bersama K/L teknis dan asosiasi industri.

- **Triwulan IV:** Ditargetkan adanya finalisasi kebijakan strategis dan pemantauan implementasi awal, termasuk integrasi data utilisasi BUMN industri baja dan pelaporan sinkronisasi lintas pihak.

Dengan pendekatan ini, **target tahunan IKU diproyeksikan tercapai**, mengingat bahwa pertemuan strategis di awal tahun telah membuka jalur koordinasi substansial dan berkelanjutan, serta mendorong perumusan kebijakan berbasis data dan kebutuhan aktual industri.

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

4.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Sumber Bahan Baku Berbasis Tebu			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penyusunan alternatif atas rekomendasi optimalisasi penggunaan lahan eksisting PTPN III untuk percepatan kebijakan perluasan lahan tebu.	Terlaksana	Monitoring terkait optimalisasi penggunaan lahan eksisting dilakukan secara daring pada tanggal 3 Juli 2026: • Realisasi lahan tebu giling dari lahan HGU seluas 12.023 Ha atau 20,08% dari total lahan HGU. • Penggunaan varietas unggul yang memiliki tingkat produktivitas dan rendemen yang tinggi.
2.	Penyusunan alternatif rekomendasi atas pemetaan potensi lahan untuk percepatan perluasan lahan tebu dari lahan non-HGU PTPN III.	Terlaksana	• Upaya perluasan lahan dilakukan melalui: 1.IPL/Sewa/KSU di lahan Non HGU. 2.KSO Perhutani dan Agroforestry. 3.Kemitraan dengan Petani Tebu Rakyat.

			- Realisasi dan presentase dari target perluasan lahan Non-HGU yang telah memasuki musim panen, yaitu: 1.IPL/Sewa/KSU di lahan Non HGU = 257 Ha (8,3%). 2.KSO Perhutani dan Agroforestry = 157 Ha (10,14%). 3.Kemitraan dengan Petani Tebu Rakyat = 33.325 Ha (24,95%).
--	--	--	--

Upaya nyata untuk mencapai kinerja:

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja, yaitu dilaksanakan koordinasi intensif dengan Kementerian BUMN, PT Perkebunan Nusantara III/ PT Sinergi Gula Nusantara dan Perum Perhutani untuk melakukan penyusunan alternatif penyediaan lahan tebu untuk mendukung percepatan swasembada gula nasional.

Efisiensi sumber daya:

Beberapa upaya efisiensi penggunaan APBN namun tetap memastikan penyediaan lahan tebu terlaksana dengan baik, kegiatan dilakukan melalui Rapat Koordinasi secara daring maupun hybrid melalui video conference dan mengoptimalkan ruang rapat kantor, serta melaksanakan kunjungan lapangan yang sangat selektif.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Kendala percepatan penyusunan alternatif lahan tebu, antara lain:

1. Kondisi infrastruktur di lahan Perhutani yang mempunyai potensi dilakukan penanaman tebu masih belum memadai. Selain itu, kondisi infrastruktur juga belum mendukung untuk kegiatan tebang-muat-angkut.
2. Penyediaan sumber air untuk kegiatan pengairan lahan masih belum memadai.
3. Penanaman lahan tebu di lahan Perhutani membutuhkan intervensi untuk kegiatan pembersihan lahan bekas tanaman kayu.

Upaya perbaikan pencapaian target:

1. Perlu penyiapan infrastruktur untuk pengembangan lahan tebu yang berada di areal Perhutani sebagai upaya penambahan luas lahan tebu.
2. Perlu penyiapan sumber air yang memadai, khususnya mitigasi terjadinya El Nino di tahun 2026.

3. Dukungan manajemen untuk percepatan kegiatan pembersihan lahan di Lahan Perhutani.

4.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stabilitas Harga

Latar Belakang

Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait stabilitas harga merupakan alat ukur untuk menilai sejauh mana kebijakan lintas sektor dirumuskan dan dilaksanakan secara terkoordinasi dalam rangka menjaga stabilitas harga, khususnya untuk mendukung upaya pengendalian inflasi nasional. Proses ini mencakup keselarasan antar pemangku kepentingan dalam merespons dinamika harga komoditas strategis agar tidak menimbulkan tekanan terhadap inflasi.

Kebijakan yang dikoordinasikan dalam rangka mencapai Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stabilitas Harga, yaitu:

1. **Penguatan Koordinasi Pusat dan Daerah dalam Pengendalian Inflasi.** Pemerintah secara berkelanjutan menyelenggarakan forum koordinasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), baik melalui pertemuan reguler maupun forum strategis seperti Rakornas dan Rakorpusda. Upaya ini bertujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan, memperkuat peran TPID, serta memastikan pelaksanaan pengendalian inflasi di daerah sejalan dengan kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam Permenko Perekonomian No. 10/2017. Koordinasi ini juga mencakup penyusunan strategi jangka pendek dan menengah dalam menjaga stabilitas harga, terutama pada komoditas pangan strategis.
2. **Evaluasi Kinerja Daerah dalam Menjaga Stabilitas Harga.** Untuk meningkatkan akuntabilitas dan mendorong kinerja daerah, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pengendalian inflasi daerah melalui mekanisme penilaian TPID Award. Evaluasi ini tidak hanya menilai pencapaian output, tetapi juga proses koordinasi, inovasi kebijakan, dan sinergi lintas sektor di daerah. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan lanjutan dan sebagai referensi dalam pemberian penghargaan atau insentif kepada daerah yang dinilai berhasil menjaga kestabilan harga secara efektif.
3. **Penguatan Kapasitas TPID melalui Kegiatan Capacity Building.** Peningkatan kualitas kebijakan pengendalian inflasi turut didorong melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas kelembagaan TPID. Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman daerah terhadap dinamika inflasi, pengelolaan pasokan dan distribusi, serta penggunaan instrumen kebijakan yang adaptif dan berbasis data. Melalui penguatan kelembagaan ini, TPID diharapkan mampu merespons gejolak harga secara cepat dan terkoordinasi, sekaligus meningkatkan efektivitas perumusan kebijakan daerah yang mendukung stabilitas harga nasional.
4. **Koordinasi Strategis Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).** Dalam mengantisipasi tekanan inflasi musiman selama periode Ramadhan, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru, dilakukan koordinasi intensif dengan TPID dan kementerian/lembaga terkait. Langkah ini diimplementasikan melalui penyampaian surat imbauan, monitoring stok

dan distribusi pangan, serta penyiapan intervensi kebijakan jika diperlukan. Selain itu, pemerintah juga menyampaikan usulan penerima insentif fiskal kepada Kementerian Keuangan sebagai bentuk apresiasi terhadap daerah yang mampu menjaga stabilitas harga selama periode tersebut.

Adapun nilai dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan usaha BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan.

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 1 adalah undangan, daftar hadir, dan/atau notula rapat tentang identifikasi isu strategis kebijakan stabilitas harga (1 paket dokumen).

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputy dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputy dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 2 adalah laporan hasil rapat koordinasi dengan K/L teknis & BUMN dalam rangka debottlenecking permasalahan terkait kebijakan stabilitas harga (1 paket dokumen).

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- rumusan perencanaan program,
- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Implementasi Kebijakan terkait stabilitas harga (1 paket dokumen).

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi terkait kebijakan stabilitas harga (1 paket dokumen).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada perkiraan dan target kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2026. Adapun target triwulan sebesar 20% untuk triwulan II, 40% untuk triwulan III, 60% untuk triwulan IIII, dan 80% untuk triwulan IIV.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stabilitas Harga yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 20% atau mencapai 20% dari target Tahun 2026 sebesar 80% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU-4.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stabilitas Harga	Persentase	40%	40%	100% (Memuaskan)

Narasi tabel pengukuran kinerja dan data dukung capaian kinerja.

Realisasi kinerja **IKU-4.4 (Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stabilitas Harga)** pada Triwulan II berhasil mencapai **40%** dari target yang ditetapkan sebesar **40%**. Dengan capaian sebesar **100%**, indikator ini mendapatkan predikat **"Memuaskan"** yang mencerminkan efektivitas organisasi dalam menyelaraskan dan mengendalikan kebijakan stabilitas harga.

Keberhasilan capaian ini didukung oleh beberapa **Data Dukung** utama, yaitu:

- **Aspek Kebijakan:** Salinan regulasi, surat keputusan, atau instrumen kebijakan resmi terkait pengendalian dan stabilitas harga pada Tw II.
- **Aspek Koordinasi:** Undangan rapat, daftar hadir, foto dokumentasi, serta Notulen Rapat (Minutes of Meeting) koordinasi lintas sektoral/tim pengendalian inflasi.
- **Aspek Pengendalian:** Laporan monitoring harga berkala, evaluasi pasokan, serta matriks pengendalian kebijakan stabilitas harga di lapangan.

Kualitas/dampak dari capaian kinerja

Kualitas koordinasi yang baik memberikan **dampak (impact)** yang signifikan terhadap perekonomian nasional dan daerah. Kebijakan yang sinkron berhasil menjaga tingkat inflasi tetap terkendali dalam rentang target sasaran pemerintah, yang pada gilirannya menjaga daya beli masyarakat (khususnya masyarakat berpenghasilan rendah) tetap stabil. Kepastian iklim harga yang terkontrol ini juga memberikan dampak psikologis positif bagi pasar, mengurangi spekulasi harga dari para pelaku usaha, serta menciptakan stabilitas sosial-ekonomi yang kondusif guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Proyeksi capaian IKU per triwulanan dan keterkaitannya terhadap capaian target tahunan

Realisasi Triwulan II didorong oleh tim internal IMAFKa yang solid, serta koordinasi yang baik dengan TPIP baik Internal Kemenko maupun eksternal. Dengan kinerja yang baik tersebut dan rencana kegiatan pada triwulan selanjutnya, diperkirakan target tahun 2026 dapat terpenuhi.

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

4.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stabilitas Harga			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2026	Terlaksana	Telah disampaikan surat kepada Presiden nomor : No. EK.02.05/138/M.EKO N/05/2026 dan No.28/06/GBI-DKEM/Srt/B
2.	Pelaksanaan proses evaluasi kinerja TPID tahun 2025 (TPID Award 2026)	Terlaksana	Terlaksana bekerjasama dengan BI, Bappenas, Kemenkeu dan Kemendagri
3.	Penetapan hasil evaluasi kinerja melalui Kepmenko Perekonomian	Terlaksana	Terlaksana dan telah ditetapkan dalam berita Acara melalui Rapat Pleno Eselon 1 Penetapan Pemenang TPID Award tahun 2025 (award 2026): BA-01/SET.TPIP/06/2026 dan melalui Kepmenko No 505 tahun 2026
4.	Capacity Building TPID	Terlaksana	Terlaksana di beberapa TPID Provinsi/Kab/Kota
5.	Penyusunan dan Penyampaian Laporan Analisis Inflasi Bulanan	Terlaksana	Telah disusun dan disampaikan kepada Menko Perekonomian

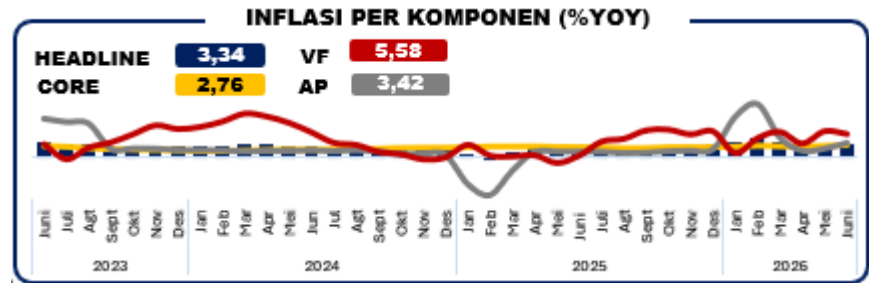
Upaya nyata untuk mencapai kinerja:

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah koordinasi dengan unit kerja dan K/L lain untuk mengupdate isu-isu terkini yang menjadi bahan analisis.

Capaian inflasi pada Juni 2025 sebesar 3,34% (yoy) dipengaruhi oleh kelompok volatile food yang mengalami inflasi 5,58% (yoy) akibat tekanan harga dari beberapa komoditas seperti beras, cabai merah, daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang merah. Komponen inflasi inti (core) dan inflasi Diatur Pemerintah

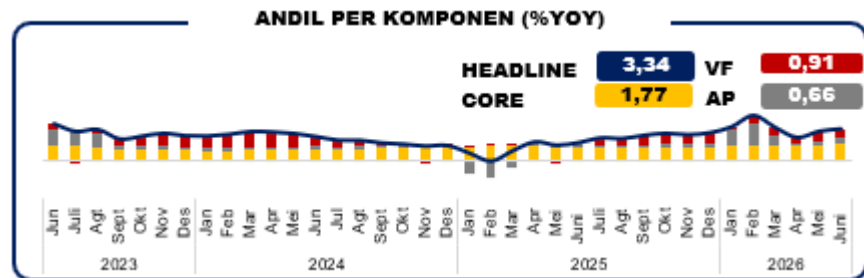
(Administered Price/AP) menyumbang inflasi sebesar 3,42% (yoy) dan 2,76% (yoy).

Grafik 1. Perkembangan Inflasi berdasarkan komponen (% yoy)



Sumber : BPS

Grafik 2. Andil Inflasi berdasarkan komponen



Sumber : BPS

Inflasi Juni 2025 tercatat sebesar 0,44% (mtm) lebih tinggi dibandingkan bulan Mei 2026. Beberapa hal yang mendorong inflasi Juni 2026 yaitu pada komponen inti terjadi penurunan harga minyak sawit dunia pada Mei-Juni 2026, pada komponen Volatile Food terjadi kenaikan harga bawang merah di sejumlah sentra produksi (Enrekang, Demak, Malang dan Sampang), kenaikan harga bawang putih impor akibat meningkatnya biaya angkutan barang dan pelemahan nilai tukar rupiah. Selain itu pada kelompok Administered Price terjadi penyesuaian harga BBM nonsubsidi pada 1 dan 10 Juni 2026 untuk Pertamina, Pertamina turbo, dextlite, dan Pertamina dex.

Efisiensi sumber daya:

Penggunaan anggaran yang belum bisa dipakai dalam pelaksanaan tugas pengendalian inflasi berdampak pada menurunnya intensitas koordinasi, yang pada gilirannya membatasi optimalisasi peran Kemenko Perekonomian dalam mengawal terjaganya inflasi dalam kisaran sasaran. Inflasi Indonesia pada triwulan II terkendali dalam kisaran sasaran. Oleh karena itu, pergerakan harga pangan dijaga dalam rentang hasil kesepakatan HLM TPIP yakni 3-5%. Langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi guna menjaga inflasi dalam kisaran sasaran diantaranya pelaksanaan kegiatan yang mengoptimalkan ruang rapat kantor dan metode daring maupun hybrid melalui video conference.

Proyeksi efisiensi diperkirakan mencapai Rp10.000.000,- hingga Rp25.000.000,- untuk setiap kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan melalui paket meeting. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lain yang sifatnya lebih strategis dan insidentil pada periode berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Kendala pencapaian target:

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut :

1. Kelompok Volatile Food (VF) masih menjadi sumber utama tekanan inflasi pada Juni 2026. Kenaikan harga komoditas pangan strategis seperti ikan segar, beras, minyak goreng, cabai merah, daging ayam ras, cabai rawit, bawang merah, dan daging sapi menunjukkan bahwa pengendalian inflasi pangan masih menghadapi tantangan, khususnya dalam menjaga kecukupan pasokan, kelancaran distribusi, dan stabilisasi harga di berbagai daerah.
2. Kelompok Administered Prices (AP) masih mengalami tekanan inflasi yang dipengaruhi oleh kenaikan harga bensin, tarif angkutan udara, serta bahan bakar rumah tangga. Kondisi ini mencerminkan bahwa penyesuaian harga pada komoditas yang diatur pemerintah dan meningkatnya biaya transportasi masih menjadi faktor yang perlu diantisipasi melalui penguatan koordinasi kebijakan pengendalian inflasi pusat dan daerah.

Upaya perbaikan pencapaian target:

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, antara lain:

1. Melaksanakan program/kegiatan sesuai rencana aksi pada triwulan III Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi, dan pelaksanaan rakor pusat dan daerah dengan subtema tematik per kawasan.
2. Pelaksanaan Capacity building dalam rangka pembinaan TPID maupun terkait evaluasi kinerja TPID.

4.5 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Sektor Eksternal

Latar Belakang

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Sektor Eksternal. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.

Kebijakan yang dikoordinasikan dalam rangka mencapai Persentase Efektivitas Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Stabilitas Ekonomi dan Sektor Eksternal, yaitu:

- **Peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi** melalui penguatan sektor riil yang berorientasi pada penciptaan nilai tambah dan padat karya;
- **Penguatan kinerja ekspor** melalui monitoring pelaksanaan kebijakan penempatan DHE serta peningkatan peran BUMN ekspor dalam memperluas akses pasar;
- **Pengawasan kebijakan sektor eksternal**, termasuk penguatan neraca transaksi berjalan serta antisipasi dampak kebijakan eksternal seperti tarif ekspor-impor oleh negara mitra dagang (antara lain kebijakan tarif AS terhadap produk baja dan lainnya);
- **Peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional (LCT)** untuk mengurangi ketergantungan terhadap valuta asing dan menjaga stabilitas nilai tukar;

Adapun nilai dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan usaha BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan.

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 1 adalah undangan, daftar hadir, dan/atau notula rapat tentang identifikasi isu strategis kebijakan sektor eksternal (1 paket dokumen).

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 2 adalah laporan hasil rapat koordinasi dengan K/L teknis & BUMN dalam rangka debottlenecking permasalahan terkait kebijakan sektor eksternal (1 paket dokumen).

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- rumusan perencanaan program,
- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Implementasi Kebijakan terkait sektor eksternal (1 paket dokumen).

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi terkait kebijakan sektor eksternal (1 paket dokumen).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada perkiraan dan target kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2026. Adapun target triwulan sebesar 20% untuk triwulan II, 40% untuk triwulan III, 60% untuk triwulan IIII, dan 80% untuk triwulan IIV.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Sektor Eksternal yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 20% atau mencapai 20% dari target Tahun 2026 sebesar 80% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU-4.5 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Sektor Eksternal	Persentase	40%	40%	100% (Memuaskan)

Narasi tabel pengukuran kinerja dan data dukung capaian kinerja.

Realisasi kinerja **IKU-4.5 (Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Sektor Eksternal)** pada Triwulan II berhasil mencapai **40%** dari target yang ditetapkan sebesar **40%**. Dengan capaian sebesar **100%**, indikator ini mendapatkan predikat **"Memuaskan"** yang mencerminkan optimalnya penyelarasan serta pengendalian kebijakan di bidang sektor eksternal.

Keberhasilan capaian ini didukung oleh beberapa **Data Dukung** utama, yaitu:

- **Aspek Kebijakan:** Salinan regulasi, surat keputusan, atau instrumen kebijakan resmi terkait kerja sama dan isu sektor eksternal yang disinkronisasikan pada TW II.
- **Aspek Koordinasi:** Undangan rapat, daftar hadir, foto dokumentasi, serta Notulen Rapat (Minutes of Meeting) koordinasi lintas sektoral/lembaga.
- **Aspek Pengendalian:** Laporan monitoring/evaluasi berkala serta matriks pengendalian implementasi kebijakan sektor eksternal di lapangan.

Kualitas/dampak dari capaian kinerja

Koordinasi upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4-5,6% untuk tahun 2026 menjadi lebih terintegrasi dan efektif. Laporan ekspor-impor tersusun lebih efisien dan efektif. Terjaganya investment credit rating Indonesia. Teridentifikasinya dampak penerapan tarif resiprokal AS bagi perekonomian Indonesia lebih dini dan terarah. Penyusunan offering tarif bagi AS lebih fokus dan terarah. Penyempurnaan sistem informasi DHE SDA yang lebih efisien dan efektif.

Proyeksi capaian IKU per triwulanan dan keterkaitannya terhadap capaian target tahunan

- Triwulan I dan II: Telah dicapainya serangkaian kegiatan koordinasi strategis yang berkontribusi terhadap penajaman isu dan kebijakan terkait sektor eksternal.
- Triwulan III: Akan diarahkan pada Laporan / analisis / kajian / rekomendasi kebijakan terkait bidang stabilitas ekonomi dan sektor eksternal; Pelaksanaan Koordinasi Working Group (WG) Tarif dan Market Access; Sosialisasi DHE SDA, Koordinasi Penyusunan Sistem Informasi Terintegrasi DHE SDA; serta Koordinasi dan Sinkronisasi Kajian NTM Indonesia.
- Triwulan IV: Akan ditargetkan pada Laporan / analisis / kajian / rekomendasi kebijakan terkait bidang stabilitas ekonomi dan sektor eksternal; Evaluasi DHE SDA; Penyusunan Kajian NTM Indonesia; serta Evaluasi Implementasi LCT.

Dengan pendekatan ini, target tahunan IKU diproyeksikan tercapai, mengingat bahwa pertemuan strategis di semester pertama tahun telah memperluas jalur koordinasi substansial dan berkelanjutan, serta mendorong perumusan kebijakan berbasis data dengan didukung oleh tim internal IMAFKa yang solid, serta koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait baik Internal Kemenko maupun eksternal.

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

4.5 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Sektor Eksternal			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Laporan / analisis / kajian / rekomendasi kebijakan terkait bidang stabilitas ekonomi dan sektor eksternal	Terlaksana	1. Telah disusunnya Laporan Ekspor-Impor Indonesia Februari – April 2026 yang rilis pada April – Juni 2026 2. Laporan Pasar Harian (Nilai Tukar Rupiah, IHSG, dan Harga Minyak) 3. Telah disusun bahan untuk Koordinasi Investment Credit Rating Indonesia pada pertemuan dengan S&P (2 Juni 2026), serta bahan speech pimpinan, dll 4. Analisis/Laporan Perkembangan Pasar

			Keuangan Dampak Perang Iran AS 5. Laporan Kebijakan Penguatan Devisa – April 2026
2.	Pelaksanaan Koordinasi Working Group (WG) Tarif dan Market Access pada Perundingan Perdagangan Internasional	Terlaksana	1. Rapat Koordinasi Persiapan Pertemuan dengan USTR – 10 Juni 2026
3.	Monitoring dampak kebijakan Tarif Baru AS		1. Laporan Proyeksi Ekspor Impor Dampak Kebijakan AS 2. Mengikuti Rapat Pembahasan Lanjutan Mekanisme Penangguhan dan/atau Pembekuan Persetujuan Ekspor Migas sebagai Dampak Perang Iran/AS
4.	Monitoring pengembangan sistem pengembangan terintegrasi DHE SDA		1. Rapat Koordinasi mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) – 14 April 2026 2. Rapat Koordinasi Pembahasan Persiapan Rakortas Menteri Terkait Devisa Hasil Ekspor dan Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam Strategis - 20 Mei 2026 3. Sosialisasi Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam Strategis – 26 Mei 2026 4. Rapat Harmonisasi RPKM DHE SDA - 3 Juni 2026

Upaya nyata untuk mencapai kinerja:

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah koordinasi dengan unit kerja dan K/L lain untuk mengupdate isu-isu terkini yang menjadi bahan laporan dan analisa serta tindak lanjut dari penyelenggaraan Rapat Koordinasi.

Efisiensi sumber daya:

Sebagian besar kegiatan dilaksanakan secara virtual melalui platform Zoom Meeting, sehingga biaya perjalanan dinas dan penggunaan sumber daya lainnya dapat ditekan, namun partisipasi aktif dan efektivitas pencapaian tujuan kegiatan tetap terjaga. Proyeksi efisiensi diperkirakan mencapai Rp10.000.000,- hingga Rp25.000.000,- untuk setiap kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan melalui paket meeting. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lain yang sifatnya lebih strategis dan insidental pada periode berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sepanjang Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut :

- Permintaan bahan pada waktu yang mendesak menjadi tantangan, untuk mempermudah koordinasi, kerja bersama dilakukan melalui aplikasi onedrive serta dibuat database update perekonomian terkini sehingga dapat langsung digunakan ketika dibutuhkan dalam menyusun suatu bahan.
- Pemberlakuan tarif baseline 10% dan tarif sektoral bagi produk ekspor Indonesia ke AS dapat membebani kinerja ekspor nasional mengingat AS merupakan pasar ekspor terbesar No.2 bagi Indonesia. Ancaman pemberlakuan tarif resiprokal 32% dapat memperburuk kinerja ekspor nasional sehingga diperlukan upaya mitigasi atas ancaman tersebut.
- Pemberlakuan tarif unilateral AS bagi seluruh mitra dagangnya dan konflik di Timur Tengah telah meningkatkan ketidakpastian ekonomi global sehingga dapat membebani kinerja perekonomian Indonesia untuk tahun 2025 sehingga diperlukan upaya lebih lanjut agar target pertumbuhan tercapai.

Upaya perbaikan pencapaian target:

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, antara lain penguatan Tim Kerja dan peningkatan kapasitas pegawai melalui berbagai pelatihan serta penggunaan teknologi informasi termasuk one drive. Terkait kebijakan tarif AS, diperlukan upaya mitigasi dan koordinasi lintas K/L untuk memastikan terjaganya kinerja ekspor nasional dan tercapainya target pertumbuhan ekonomi Indonesia.

4.6 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Program Stimulus Ekonomi

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Program Stimulus Ekonomi adalah ukuran untuk menilai efektivitas dan kualitas pelaksanaan pemantauan serta evaluasi terhadap berbagai program stimulus ekonomi yang ditujukan untuk penguatan ekonomi masyarakat. Indeks ini mencerminkan sejauh mana proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara komprehensif, tepat waktu, akurat, dan menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan kebijakan.

Indeks ini mengukur berbagai dimensi kualitas monitoring dan evaluasi, antara lain: (1) ketepatan waktu pelaporan dan pemantauan, (2) akurasi dan validitas data yang dikumpulkan, (3) cakupan dan kedalaman analisis terhadap dampak program, (4) kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan, serta (5) tingkat responsivitas dalam menindaklanjuti temuan evaluasi. Penilaian dilakukan melalui penilaian mandiri (self-assessment) dan verifikasi oleh tim independen terhadap dokumen monitoring, laporan evaluasi, serta implementasi tindak lanjut dari rekomendasi yang dihasilkan.

Dalam pelaksanaannya, Asisten Deputi yang membidangi stimulus ekonomi berperan dalam mengkoordinasikan proses monitoring dan evaluasi bersama Kementerian/Lembaga pelaksana program stimulus, melakukan analisis capaian dan dampak program, serta menyusun rekomendasi perbaikan kebijakan. Koordinasi lintas K/L diperlukan untuk memastikan data dan informasi yang komprehensif dapat dikumpulkan dan dianalisis secara holistik. Adapun beberapa daftar stimulus yang dikoordinasikan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan antara lain:

1. Bantuan Pemerintah Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi sebanyak 100.000 Orang, Uang Saku sebesar UMP, masa 6 bulan (3 bulan di 2025, 3 bulan di 2026)
2. Implementasi PPh Pasal 21 DTP Penghasilan Peserta Pemagangan 2025-2026
3. Penyesuaian Jangka Waktu Pemanfaatan dan Penerima Manfaat PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM tertentu s.d. Tahun 2029
4. Perpanjangan PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja di Sektor Pariwisata dan Industri Padat Karya (APBN 2026)
5. Perpanjangan PPN DTP Sektor Perumahan, untuk Rumah dengan harga s.d Rp5 Milyar untuk bagian harga Rp2 Milyar sebesar 100% (Jan-Des 2026) dan diperpanjang hingga 2027 (Konpers APBN Kita)
6. Perpanjangan dan Perluasan Program Diskon Iuran JKK dan JKM untuk semua penerima Bukan Penerima Upah (BPU) Tahun 2026
7. Diskon Tiket Kereta (PT KAI) sebesar 30% x harga tiket (NATARU 22 Des -10 Jan 26)
8. Diskon Angkutan Laut (PT PELNI) sebesar 20% x tarif dasar tidak termasuk asuransi dan pas Pelabuhan (NATARU 22 Des 25 -10 Jan 26)
9. Diskon Angkutan Penyeberangan (PT ASDP) sebesar 100% Jasa Pelabuhan (NATARU 22 Des 25 -10 Jan 26)
10. Diskon Tiket Pesawat (NATARU 22 Des -10 Jan 26)
11. Program diskon transportasi HBKN (Idul Fitri)
12. Program diskon transportasi libur sekolah
13. Program diskon transportasi HBKN (Nataru)

Adapun nilai dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan usaha BUMN bidang industri manufaktur,

agro, farmasi, dan kesehatan diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan.

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 1 adalah undangan, daftar hadir, dan/atau notula rapat tentang identifikasi isu strategis kebijakan program stimulus ekonomi (1 paket dokumen).

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 2 adalah laporan hasil rapat koordinasi dengan K/L teknis & BUMN dalam rangka debottlenecking permasalahan terkait program stimulus ekonomi (1 paket dokumen).

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- rumusan perencanaan program,
- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Implementasi Kebijakan terkait program stimulus ekonomi (1 paket dokumen).

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi terkait program stimulus ekonomi (1 paket dokumen).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada perkiraan dan target kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2026. Adapun target triwulan sebesar 20% untuk triwulan II, 40% untuk triwulan III, 60% untuk triwulan IIII, dan 80% untuk triwulan IIV.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Sektor Eksternal yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 20% atau mencapai 20% dari target Tahun 2026 sebesar 80% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU-4.6 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian	Persentase	40%	40%	100% (Memuaskan)

kebijakan terkait Program Stimulus Ekonomi				
--	--	--	--	--

Narasi tabel pengukuran kinerja dan data dukung capaian kinerja.

Realisasi kinerja **IKU-4.6 (Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Program Stimulus Ekonomi)** pada Triwulan II berhasil mencapai **40%** dari target yang ditetapkan sebesar **40%**. Dengan capaian sebesar **100%**, indikator ini mendapatkan predikat **"Memuaskan"** yang mencerminkan efektivitas organisasi dalam menyelaraskan dan mengendalikan kebijakan stimulus ekonomi.

Keberhasilan capaian ini didukung oleh beberapa **Data Dukung** utama, yaitu:

- **Aspek Kebijakan:** Salinan regulasi atau instruksi kerja terkait pelaksanaan program stimulus ekonomi pada TW II.
- **Aspek Koordinasi:** Undangan, daftar hadir, foto dokumentasi, dan Notulen Rapat terkait sinkronisasi lintas sektor.
- **Aspek Pengendalian:** Laporan monitoring/evaluasi berkala dan matriks keselarasan program di lapangan.

Kualitas/dampak dari capaian kinerja

Dari sisi **kualitas**, efektivitas sinkronisasi dan koordinasi yang dilakukan berhasil mengeliminasi tumpang tindih regulasi antar-instansi atas koordinasi yang dilakukan. Hasilnya, pengendalian kebijakan dapat dilakukan secara *real-time* dan responsif, memastikan setiap tahapan program stimulus ekonomi berjalan di atas koridor hukum yang akuntabel dan transparan.

Kualitas tata kelola yang matang ini secara langsung memberikan **dampak (impact) yang signifikan**. Dengan kebijakan yang sinkron dan terarah, penyaluran berbagai program stimulus ekonomi kepada masyarakat dan pelaku usaha dapat terakselerasi dengan minim hambatan administratif. Hal ini menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan pasar (*business confidence*) serta mempercepat pemulihan ekonomi pada sektor-sektor strategis.

Proyeksi capaian IKU per triwulanan dan keterkaitannya terhadap capaian target tahunan

- **Triwulan I:** Telah dicapainya serangkaian kegiatan koordinasi strategis yang berkontribusi terhadap penajaman isu dan kebijakan terkait sektor eksternal.
- **Triwulan II:** Akan difokuskan pada Laporan / analisis / kajian / rekomendasi kebijakan terkait bidang stabilitas ekonomi dan sektor eksternal; Penyusunan Kajian Dampak Kebijakan Tarif Baru AS; Pelaksanaan Koordinasi Working Group (WG) Tarif dan Market Access; serta Koordinasi Penyusunan Sistem Informasi Terintegrasi DHE SDA.
- **Triwulan III:** Akan diarahkan pada Laporan / analisis / kajian / rekomendasi kebijakan terkait bidang stabilitas ekonomi dan sektor eksternal;

Pelaksanaan Koordinasi Working Group (WG) Tarif dan Market Access; Sosialisasi DHE SDA, Koordinasi Penyusunan Sistem Informasi Terintegrasi DHE SDA; serta Koordinasi dan Sinkronisasi Kajian NTM Indonesia.

- **Triwulan IIV:** Akan ditargetkan pada Laporan / analisis / kajian / rekomendasi kebijakan terkait bidang stabilitas ekonomi dan sektor eksternal; Evaluasi DHE SDA; Penyusunan Kajian NTM Indonesia; serta Evaluasi Implementasi LCT.

Dengan pendekatan ini, **target tahunan IKU diproyeksikan tercapai**, mengingat bahwa pertemuan strategis di awal tahun telah membuka jalur koordinasi substansial dan berkelanjutan, serta mendorong perumusan kebijakan berbasis data dengan didukung oleh tim internal IMAFKa yang solid, serta koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait baik Internal Kemenko maupun eksternal.

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

4.6 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Program Stimulus Ekonomi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Laporan / analisis / kajian / rekomendasi kebijakan terkait program stimulus ekonomi	Terlaksana	1. Bahan Taklimat Presiden 2. Bahan Preskon Stimulus Semester II 2026
2.	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Akselerasi Pertumbuhan TW II	Terlaksana	1. Rapat Internal Pembahasan Pokja Pertumbuhan Ekonomi 21 April 2026 2. Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Program Pemerintah Untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi – 22 April 2026 3. Rapat Internal Pembahasan Kurs dan Insentif Bea Masuk Elastik – 26 April 2026 4. Rapat Koordinasi Akselerasi Pertumbuhan

			Ekonomi Triwulan II – 2026 – 12 Mei 2026 5. Rapat Koordinasi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II – 2026 (Program Prioritas) – 18 Mei 2026 6. Rapat Koordinasi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II – 2026 (KDMP dan Bansos) – 22 Mei 2026 7. Rapat Koordinasi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II – 2026 melalui Percepatan Realisasi Belanja K/L – 4 Juni 2026 8. Rapat Koordinasi Update Kesiapan Pelaksanaan Paket Stimulus Triwulan II/Semester 2 – 5 Juni 2026 9. Rapat Pembahasan Indonesia Country Growth and Jobs Report Policy Matrix – 25 Juni 2026
3.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program stimulus ekonomi TW II	Terlaksana	1. Rapat Evaluasi Pelaksanaan WFH Tahun 2026 – 22 Mei 2026 2. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan dan Bantuan Pangan – Juni 2026

Upaya nyata untuk mencapai kinerja:

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah:

1. Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait guna memastikan implementasi berbagai program stimulus ekonomi dan kebijakan strategis berjalan sesuai arah kebijakan pemerintah.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan program stimulus ekonomi, termasuk identifikasi berbagai isu strategis dan potensi risiko yang dapat memengaruhi efektivitas kebijakan.
3. Menyusun analisis, bahan briefing, serta rekomendasi kebijakan sebagai masukan bagi pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan dan perumusan langkah tindak lanjut.
4. Memfasilitasi penyelesaian berbagai permasalahan lintas sektor melalui forum koordinasi teknis, rapat koordinasi, maupun rapat tingkat pimpinan guna mempercepat implementasi kebijakan.

Efisiensi sumber daya:

Sebagian besar kegiatan dilaksanakan secara virtual melalui platform Zoom Meeting, sehingga biaya perjalanan dinas dan penggunaan sumber daya lainnya dapat ditekan, namun partisipasi aktif dan efektivitas pencapaian tujuan kegiatan tetap terjaga. Proyeksi efisiensi diperkirakan mencapai Rp10.000.000,- hingga Rp25.000.000,- untuk setiap kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan melalui paket meeting. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lain yang sifatnya lebih strategis dan insidentil pada periode berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Kendala pencapaian target:

Sepanjang Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan, antara lain:

- Dinamika kondisi perekonomian global dan domestik, termasuk ketidakpastian perdagangan internasional dan perkembangan geopolitik (Eskalasi Perang AS-Iran), memerlukan penyesuaian kebijakan dan langkah koordinasi yang lebih responsif.
- Perbedaan waktu penyampaian data dan informasi dari Kementerian/Lembaga pelaksana menyebabkan perlunya proses konsolidasi dan validasi data yang lebih intensif.
- Tingginya kebutuhan koordinasi lintas sektor serta banyaknya program prioritas pemerintah memerlukan penguatan mekanisme monitoring dan tindak lanjut hasil koordinasi.
- Beberapa program stimulus masih memerlukan percepatan implementasi dan penguatan sinergi antar pemangku kepentingan agar target yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Upaya perbaikan pencapaian target:

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan II Tahun 2026, beberapa upaya perbaikan yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya antara lain:

- Meningkatkan intensitas koordinasi dan monitoring bersama Kementerian/Lembaga pelaksana guna memastikan implementasi program stimulus ekonomi dan kebijakan strategis berjalan sesuai target.
- Memperkuat mekanisme pelaporan, pertukaran data, dan evaluasi pelaksanaan program untuk meningkatkan kualitas monitoring serta mempercepat pengambilan keputusan.
- Meningkatkan kualitas analisis dan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil evaluasi implementasi program dan perkembangan kondisi ekonomi terkini.
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan koordinasi, dokumentasi, monitoring tindak lanjut hasil rapat, serta pengelolaan data dan informasi.
- Mendorong penguatan sinergi antar Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan implementasi kebijakan dan penyelesaian berbagai isu strategis lintas sektor.

5

Sasaran Kegiatan 5: Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 5: Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan yang Berkualitas yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur,

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Bidang Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/ *Stakeholder* terkait. Survei ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survei ini terdiri atas 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan *Google Form*.

Kepuasan consumer akan masuk kategori terpenuhi apabila hasil indeks pada survey pelayanan yang sudah diberikan kepada stakeholder mendapatkan nilai akhir minimal tiga (3) dari skala empat (4)

Agro, Farmasi, dan Kesehatan Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/*Stakeholder* terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian} = \frac{\Sigma \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 3 dari 4. Penetapan target 3 atau “puas” tahun 2026 ditetapkan untuk memastikan bahwa penerima layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan dapat mendapatkan pelayanan yang terbaik sesuai harapan. Adapun penetapan target dilakukan secara semesteran sebesar 3 dari 4, atau setidaknya dapat mempertahankan capaian semester sebelumnya.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, belum dilakukan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi. Hal ini dikarenakan sesuai dengan dokumen Rencana Aksi pada triwulan II untuk IKU Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan, masih dilakukan Persiapan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan Semester I 2026. Berdasarkan capaian Asdep Moneter dan Sektor Eksternal Triwulan IIV tahun 2024, IKU 4.1: indeks kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan mencapai telah terealisasi sebesar 3 dari 4 atau mencapai 100% dari target Tahun 2026 sebesar 3 dari 4 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
-------------------------	--------	--------------	-----------------	-----------

IKU-5.1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan	Indeks	3 dari 4	4	100%
--	--------	----------	---	------

Proyeksi capaian IKU per triwulanan dan keterkaitannya terhadap capaian target tahunan

Persiapan survei dalam rangka memperoleh angka realisasi capaian Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan tercapai berdasarkan koordinasi yang baik antara pegawai di Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan dengan stakeholder terkait. Dengan mempertahankan koordinasi yang baik tersebut, diperkirakan target tahunan akan tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan TW II

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

5.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Pelaksanaan dan pelaporan survei kepuasan layanan Semester I 2026	Terlaksana	Telah dilakukan distribusi survei kepada responden survei dari stakeholder yang berkoordinasi baik dengan tim kerja keasdepan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan melalui Gform
2.	Penguatan engagement dengan stakeholder	Terlaksana	Telah dilaksanakan sepanjang triwulan I secara

	(kehadiran aktif dalam forum koordinasi/undangan baik formal maupun informal)		tatap muka maupun daring melalui partisipasi aktif dalam rapat formal dan diskusi kelompok guna membangun kedekatan, menyelaraskan persepsi, serta mempercepat pengambilan keputusan bersama pemangku kepentingan utama.
3.	Penyampaian Data dan Informasi Pengendalian Inflasi kepada pihak eksternal	Terlaksana	Telah dilaksanakan sesuai surat Permohonan Data Pagu dan Realisasi APBN dan APBD terkait Program/Kegiatan Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah Periode Januari - Maret 2026 nomor EKM.02.05/11/D.I.M.EKON. 4/04/2026 tanggal 14 April 2026 dan surat Penyampaian Data Laporan Analisis Inflasi Maret 2026 nomor EKM.02.05/12/D.I.M.EKON. 4/04/2026 tanggal 24 April 2026

Upaya Nyata

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah keikutsertaan pegawai keasdepan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan dalam kelompok kerja milik unit kerja lain sehingga turut meningkatkan partisipasi aktif dan koordinasi yang baik.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya adalah:

1. Sebagian pelaksanaan koordinasi dilaksanakan secara *hybrid* menggunakan media komunikasi telekonferens (*online*) sehingga perjalanan dinas luar kota dilaksanakan selektif sesuai dengan urgensi.
2. Pemberkasan administrasi persuratan sudah menggunakan aplikasi Srikandi dan media penyimpanan cloud sehingga sudah tidak memerlukan banyak peralatan ATK seperti kertas ataupun lemari untuk administrasi surat-surat tersebut.

Proyeksi efisiensi diperkirakan mencapai Rp10.000.000,- hingga Rp25.000.000,- untuk setiap kegiatan. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lain yang sifatnya lebih strategis dan insidentil pada periode berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga Triwulan II Tahun 2026, tidak ada kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

6

Sasaran Kegiatan 6: Terwujudnya tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 6: Terwujudnya tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan yang Berkualitas yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

6.1 Pelaksanaan

Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan

Latar Belakang

Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Rencana Aksi Asisten Deputi terkait pemenuhan Rencana Aksi RB di antaranya:

1. Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai
2. Tingkat Maturitas SPIP
3. Nilai SAKIP
4. Indeks Perencanaan Pembangunan
5. Tingkat Digitalisasi Arsip

Dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan RB di lingkungan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai:
 - SK Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan terkait Tim Kerja (1 paket dokumen)
2. Tingkat Digitalisasi Arsip:
 - Dokumen naskah masuk dan keluar melalui Srikandi (4 dokumen triwulanan)

3. Capaian IKU (Capaian Akuntabilitas Kinerja)
 - Dokumen pelaksanaan Dialog Kinerja (4 dokumen triwulanan)
4. Survei Penilaian Integritas (SPI)
 - Jumlah Pegawai yang mengisi Survey SPI (1 dokumen)

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan/atau RB Tematik di Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 85% penetapan target tahun 2026 didasarkan pada rencana aksi keasdepan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan tahun 2026 yang berpedoman pada manual IKU. Untuk target capaian pelaksanaan renaksi RB tahun 2026 didasarkan pada dokumen manual IKU yang telah disepakati bersama yaitu sebesar 85%.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 40% atau mencapai 47,5% dari target Tahun 2026 sebesar 85% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU-6.1 Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan	Persentase	40%	40%	100% (Memuaskan)

Capaian pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di keasdepan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan merupakan *cascading direct* dari indikator persentase pemenuhan dokumen yang menjadi

bukti pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Asdep Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan yang pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 85%. Sampai dengan laporan ini disusun, persentase pemenuhan dokumen yang menjadi bukti pelaksanaan RB di keasdepan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan sudah berjalan sesuai dengan rencana aksi yang disusun pada awal tahun dan telah disepakati bersama. Terdapat lima inisiatif strategis yang mendasari pemenuhan dokumen pelaksanaan RB di keasdepan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan, antara lain:

- a) Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai;
- b) Tingkat Maturitas SPIP;
- c) Nilai Indeks SAKIP;
- d) Indeks Perencanaan Pembangunan;
- e) Tingkat Digitalisasi Arsip

Kelima inisiatif strategis didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi RB General dan/atau RB Tematik di lingkungan keasdepan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan. Selain itu, inisiatif strategis ini dipetakan berdasarkan jumlah minimum IKU RB yang wajib didukung pada level keasdepan. Pada triwulan II-2026, fokus pelaksanaan RB dilakukan pada inisiatif:

- 1) Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Manual IKU
- 2) Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan
- 3) Penyusunan Renja 2026
- 4) Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI

Pada inisiatif terlaksananya sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dilakukan rencana aksi yaitu: pembentukan tim kerja dalam memenuhi target kinerja yang dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan (SK) Tim Kerja yang ada di keasdepan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan

Lebih lanjut, untuk inisiatif terlaksananya penggunaan arsip digital dilakukan melalui rencana aksi berupa optimalisasi implementasi SRIKANDI yang dibuktikan dengan pengarsipan naskah masuk dan naskah keluar melalui SRIKANDI, pemberian disposisi dari pimpinan, dan penyimpanan dokumen arsip aktif pada *cloud computing* sebagai *back up* data arsip aktif secara digital yang bis diakses untuk seluruh pegawai keasdepan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan.

Selain itu, untuk inisiatif terlaksananya pemantauan capaian IKU (Capaian akuntabilitas kinerja) dilakukan melalui monitoring capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan dialog kinerja yang dibuktikan dengan pengadministrasian dan dokumentasi pelaksanaan dialog kinerja yang diadakan setiap triwulanan yang dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan maupun pejabat fungsional lainnya melalui masing-masing tim kerja.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) di Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	Laporan Kinerja Triwulan I dan II telah disusun sesuai Nota Dinas (ND) Permohonan Penyusunan Narasi Kinerja Triwulan I dan II T.A 2026 Nomor : AK.03.01/119/D.I.M.EKON. 1/07/2026 tanggal 1 Juli 2026
2.	Penyusunan Revisi Renja 2026	Belum Terlaksana	Belum terdapat arahan lebih lanjut dari unit Sekretaris Deputi dalam penyusunan Renja 2026
3.	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Implementasi Srikandi dilakukan untuk administrasi pemberkasan surat masuk maupun keluar.

Upaya Nyata

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah keikutsertaan pegawai keasdepan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan dalam masing-masing kelompok kerja untuk melaksanakan tugasnya masing-masing.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya adalah:

- Sebagian pelaksanaan koordinasi dilaksanakan secara *hybrid* menggunakan media komunikasi telekonferens (*online*), sehingga perjalanan dinas luar kota dilaksanakan selektif sesuai dengan urgensi.
- Pemberkasan administrasi persuratan sudah menggunakan aplikasi Srikandi dan media penyimpanan cloud sehingga sudah tidak memerlukan banyak peralatan ATK seperti kertas ataupun lemari untuk administrasi surat-surat tersebut.

Proyeksi efisiensi diperkirakan mencapai Rp10.000.000,- hingga Rp25.000.000,- untuk setiap kegiatan. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lain yang sifatnya lebih strategis dan insidentil pada periode berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga Triwulan II Tahun 2026, tidak ada kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Jakarta, 10 Juli 2026

Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang
Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan
Kesehatan



Mochamad Edy Yusuf